

**PETISI SOETARDJO TAHUN 1936**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

MARIA PURWANINGSIH

NIM: 041314016

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2009**

SKRIPSI

PETISI SOETARDJO TAHUN 1936

Oleh

Maria Purwaningsih

NIM: 041314016

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. P. J Suwarno, S.H

Tanggal 20 Januari 2009

Pembimbing II



Drs. A. K Wiharyanto, M.M

Tanggal 28 Januari 2009

SKRIPSI

PETISI SOETARDJO TAHUN 1936

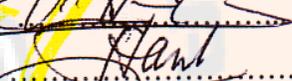
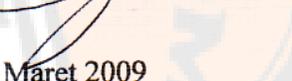
Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Maria Purwaningsih

NIM: 041314016

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 6 Maret 2009  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua : Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si	
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota : Prof. Dr. P. J Suwarno, S.H	
Anggota : Drs. A. K. Wiharyanto, M.M	
Anggota : Drs. Y.R Subakti, M.Pd	

Yogyakarta, 6 Maret 2009

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

H

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### ALAMAN MOTTO

Yang membuat seseorang kaya adalah hatinya. Ia kaya berdasarkan apa  
dirinya, bukan berdasarkan apa yang dimilikinya

(Henry Ward Beecher)

Orang yang mengatakan tidak punya waktu adalah orang yang pemalas

(Lichterberg)

Rasa takut bukanlah untuk dinikmati tetapi untuk dihadapi

Orang bijaksana selalu menikmati kehidupannya dengan memiliki banyak  
persahabatan

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya kecilku ini kan ku persembahkan untuk**

- ✚ Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu melindungi dan mendengarkan tiap doa yang kupanjatkan**
- ✚ Kedua orang tuaku Bapak Yohanes Sumarsono dan mama Margareta Paryati yang telah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan dukungan serta selalu mendoakan anak-anaknya agar sukses di kemudian hari**
- ✚ Adikku Felisitas Purnaningsih yang selalu menyemangati ku dalam menyelesaikan tugas akhir ini**
- ✚ Mas Rafael Ase yang selalu mendampingiku dan mencintaiku**
- ✚ Semua Keluarga besarku**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

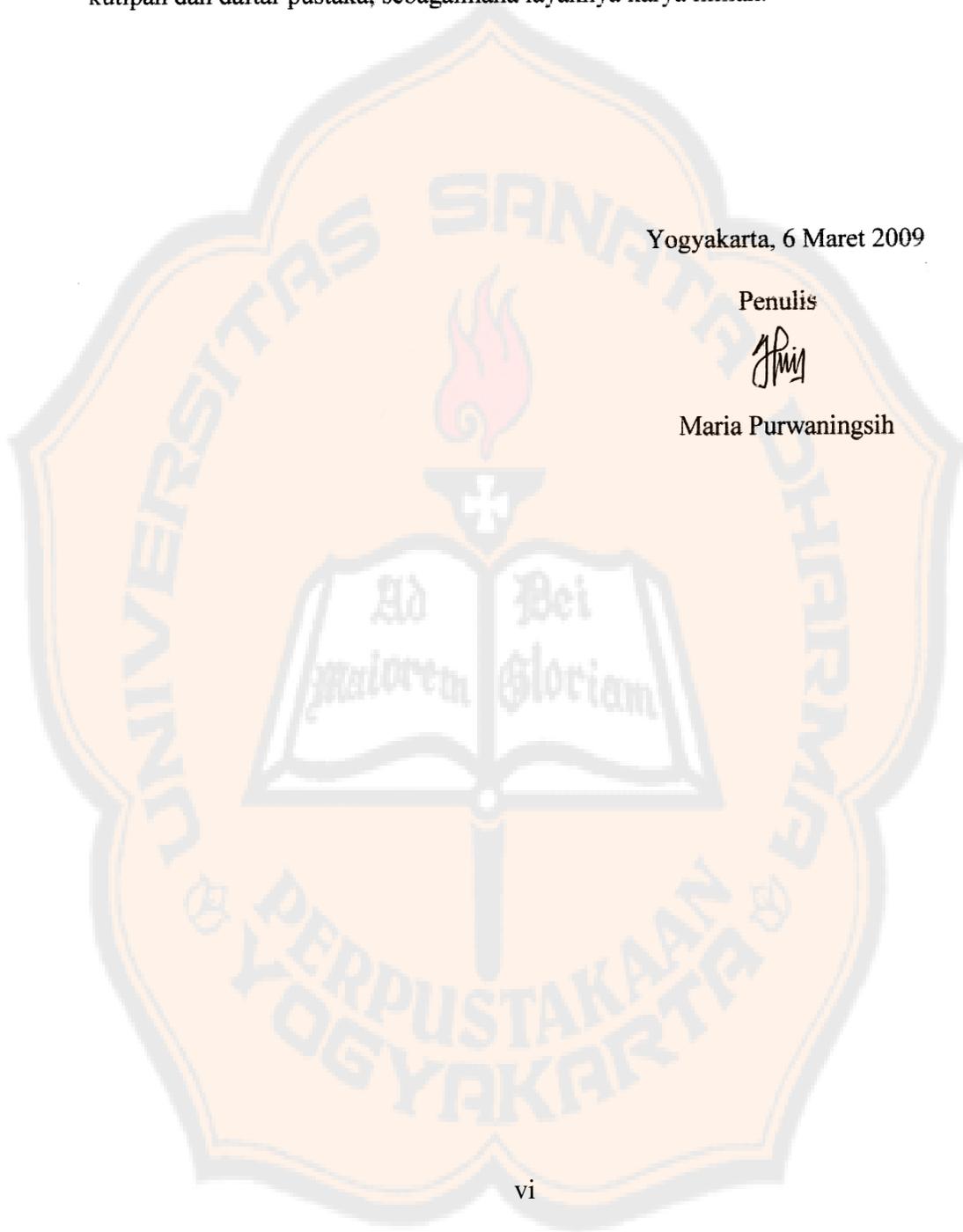
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 6 Maret 2009

Penulis



Maria Purwaningsih



**MARIA PURWANINGSIH  
041314016**

**ABSTRAK  
PETISI SOETARDJO TAHUN 1936**

Skripsi ini bertujuan untuk membahas serta menganalisis tiga permasalahan pokok yaitu: 1. Faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936; 2. Reaksi rakyat terhadap Petisi Soetardjo; 3. Reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah, yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik, ekonomi, dan sosial. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Petisi Soetardjo tahun 1936 muncul karena penangkapan-penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan nasional oleh pemerintah Belanda dan terjadinya pemecatan-pemecatan serta pengurangan gaji pegawai Indonesia dan pajak yang dibebankan terlalu tinggi semakin membuat rakyat Indonesia menderita.

Ada dua kelompok yang muncul ketika Petisi Soetardjo diajukan yaitu kelompok yang mendukung dan menolak. Kelompok yang mendukung seperti pers Indonesia, Pergerakan Penyadar, Partai Arab Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi), Pagoejoeban Pasoendan, dan lain-lainnya menganggap bahwa Indonesia sudah saatnya diberi hak berotonomi. Sedangkan kelompok yang menolak seperti Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) menilai bahwa Petisi Soetardjo tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan mereka yaitu merdeka seutuh-utuhnya dan tidak berada di bawah pemerintahan Belanda atau lepas dari Belanda.

Pada akhirnya Petisi Soetardjo ditolak oleh pemerintah Belanda pada tanggal 16 November 1938 dengan alasan bahwa Indonesia belum siap untuk mempunyai otonomi dan setiap perubahan yang ada akan membahayakan pemerintah Belanda di Indonesia.

MARIA PURWANINGSIH  
041314016

ABSTRACT  
SOETARDJO'S PETITION IN 1936

The objective of this paper is to discuss and analyze its three main problems, namely: (1) the factors which support Soetardjo's Petition in 1936; (2) People's reaction toward Soetardjo's Petition; (3) Netherland government reaction on Soetardjo's Petition .

The method used in writing this paper is historical method which covers heuristic, verification, interpretation, and historiography. The approaches which are used in are political approach, economic approach, and social approach. The characteristic of this writing is descriptive analysis.

The result of this research reveals that Soetardjo's Petition in 1936 caused by the arrestment and exile of the national movement figures by Netherland government; fired and salary reduction of Indonesian employees; and taxation burdened Indonesian people, causing them to suffer.

There were two groups that supported Sutardjo's Petition. One that supported it and the othergroup which rejected it. The group supported, like Indonesian press, *Pergerakan Penyadar*, *Partai Arab Indonesia*, *Perhimpunan Indonesia*, *Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi)*, and *Pagoejoeban Pasoendan*, considered that it was the time for Indonesia to be given the right of outonomy. On the contrary, *Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)*, *Pendidikan Nasional Indonesia (New PNI)*, evaluated that Soetardjo's Petition was not appropriate with their aspirations, namely completely independent, not to be under the control of Netherland government. They wanted to be free from the Dutch colonialism.

Finally, Soetardjo's Petition was rejected by Netherland government on November 16, 1938. The reason was that Indonesia had not been ready yet to have autonomy and every transition would threaten Netherland government in Indonesia.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

### PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Maria Purwaningsih

NIM : 041314016

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PETISI SOETARDJO TAHUN 1936

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 20 April 2009

Yang menyatakan



(Maria Purwaningsih)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Petisi Soetardjo Tahun 1936”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberi ijin atas penulisan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma yang telah memberi ijin atas penulisan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberi ijin dalam penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. P. J Suwarno, S.H selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini sampai selesai.
5. Drs. A. K Wiharyanto, M.M selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini sampai selesai.
6. Segenap dosen dan karyawan Universitas Sanata Dharma khususnya FKIP yang telah membantu penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapatkan sumber demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman kos dan Pendidikan Sejarah terutama angkatan 2004 terima kasih atas kekompakannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 6 Maret 2009

Penulis



Maria Purwaningsih

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Landasan Teori.....	16
F. Metodologi Penelitian .....	21
1. Metode Penelitian .....	21
a. Perumusan Judul.....	21
b. Pengumpulan Sumber.....	22
c. Verifikasi .....	22
d. Interpretasi.....	23
e. Penulisan Sejarah (historiografi) .....	23
2. Pendekatan .....	24

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR PEMDORONG</b>	
MUNCULNYA PETISI SOETARDJO.....	26
A. Faktor Politik.....	27
B. Faktor Ekonomi.....	32
C. Faktor Sosial .....	35
<b>BAB III REAKSI RAKYAT TERHADAP PETISI</b>	
SOETARDJO.....	39
A. Pendukung Petisi Soetardjo .....	40
B. Rakyat Yang Menolak Petisi Soetardjo .....	46
<b>BAB IV REAKSI PEMERINTAH BELANDA TERHADAP</b>	
PETISI SOETARDJO.....	55
BAB V KESIMPULAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	72

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Silabus .....	72
Lampiran II : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran .....	74
Lampiran III : Gambar suatu sidang Dewan Rakyat yang sedang memperdebatkan “Petisi Soetardjo” .....	78
Lampiran IV: Gambar rapat-rapat umum yang dilakukan oleh para pendukung Petisi Soetardjo pada tahun 1938.....	79



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada bulan Oktober 1928 berlangsung Konggres Pemuda Indonesia di Jakarta. Konggres Pemuda tersebut menyetujui adanya tiga pengakuan yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Isi sumpah pemuda ini yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda ini disambut baik oleh semua orang yang merasa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Dukungan mereka dilakukan karena menganggap bahwa Sumpah Pemuda mencerminkan sebuah tekad, bukan saja untuk kaum muda tetapi juga untuk kaum tua. Peristiwa Sumpah Pemuda penting sekali, apalagi bagi persatuan kebangsaan Indonesia yang masih dalam taraf perkembangan menuju kemerdekaan dan sampai sekarang setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari sumpah pemuda.

Dua tahun setelah itu dalam bidang ekonomi sekitar tahun 1930-an mulai terlihat adanya perkembangan yang pesat dalam bidang perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan, dan perkembangan ini membawa berbagai akibat dalam bidang sosial dan politik. Pada waktu itu Indonesia merupakan daerah jajahan yang sangat pesat perkembangannya sehingga mendorong ekspor dan menarik

modal dari berbagai negara, antara lain dari Amerika dan Jepang. Hal ini menjadikan Indonesia terbuka lebar bagi lalulintas dunia.<sup>1</sup>

Dengan kemajuan yang pesat ini berbagai segi kehidupan yang masih terbelakang seperti pendidikan dan kesehatan rakyat perlu ditingkatkan. Tetapi banyak kegiatan yang mendorong kemajuan perusahaan dan perdagangan hanya dapat dinikmati oleh lapisan atas pihak kolonial saja. Pemerintah kolonial selalu memperhatikan kepentingan dan kekuasaannya saja dan tidak memperhatikan kepentingan pribumi. Hal ini menyebabkan terjadinya jurang pemisah di antara masyarakat kolonial bawah dan atas serta menimbulkan kegelisahan sosial. selama puluhan tahun. Perubahan sosial ekonomis Hindia Belanda membawa akibat meruncingnya hubungan yang tidak seimbang atau selaras antara penguasa dan yang diperintah.<sup>2</sup>

Perkembangan proses produksi yang sangat cepat dengan hasil yang bertambah besar serta upah yang sangat rendah memerlukan penyesuaian, tetapi Kepentingan rakyat selalu diabaikan Dengan keadaan yang demikian ini maka rakyat Indonesia mengalami tiga perubahan haluan yaitu :<sup>3</sup>

1. Adanya kesadaran bahwa pribumi sangat kurang daya ketahanan ekonomisnya.
2. Perlu ditekankan pada keperluan Indonesia sendiri.
3. Diusahakan agar ada kontak lebih besar dengan jiwa rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982, hal. 86-87.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 87.

<sup>3</sup> *Ibid*.

Selain ketiga faktor tersebut ada faktor lain yang berperan dalam politik di Indonesia yaitu :<sup>4</sup>

1. Pemisahan golongan Belanda dan asing semakin jauh dari pribumi.
2. Kesadaran kebangsaan kaum pribumi sendiri yang semakin besar dan meluas.
3. Kepentingan modal dan industri besar baik di Nederland maupun di Hindia Belanda sendiri.

Kaum elitisi dan kaum idealis merupakan orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian seperti para anggota *Volksraad*, menghadapi kekuatan yang ekstrim yang datang dari dua pihak yaitu pihak dari kaum nasionalis dan pihak kolonial yang konservatif dan reaksioner. Dengan adanya perkembangan yang semakin pesat dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maka semakin mendorong orang-orang Belanda datang ke Indonesia. Mereka ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keadaan seperti ini telah membuat Hindia Belanda telah terseret dalam krisis dunia.

Guna mempertahankan pemerintahannya maka pemerintah Hindia Belanda mengadakan penghematan untuk mempertahankan standard emasnya dan penghematan ini semakin tidak mempertimbangkan keadaan kepentingan pribumi. Standard emas sudah dipertahankan oleh pemerintah Belanda selama beberapa

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 88.

tahun karena daerah Hindia Belanda merupakan daerah yang paling banyak mengekspor hasil-hasil dari perusahaan-perusahaan mereka.

Perkembangan yang pesat tidak selamanya berjalan dengan lancar karena pada awal tahun tiga puluhan keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk, sebab terjadi krisis dunia yang tidak mereda. Hal ini membuat pemerintah Belanda di Hindia Belanda melakukan pengurangan upah tenaga kerja, mengurangi volume produksi, dan melakukan pemecatan terhadap kaum buruh. Kepentingan kaum perkebunan ini yang dijadikan dasar politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda dan merupakan tulang punggung perekonomian, sehingga pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan *status quo*<sup>5</sup> mereka.

Keadaan tersebut ternyata telah menyadarkan para tokoh untuk membahaskan kerjasama dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Orang-orang mulai menyadari akan pentingnya penyatuan dari perkumpulan-perkumpulan mereka untuk mencapai persatuan yang kokoh dalam menghadapi pemerintah kolonial. Meskipun nanti dalam prakteknya tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Sesudah tahun 1930-an banyak dari perkumpulan-perkumpulan di Indonesia, terutama kaum koperator menginginkan suatu bentuk kerjasama. Perbedaan antara non kooperatif dan kooperatif sudah mulai tidak berarti, kecuali satu di dalam prakteknya yaitu perbedaan di dalam metode. Perbedaan metode ini

---

<sup>5</sup> Status quo adalah keadaan semula.

merupakan suatu rintangan untuk mencapai suatu bentuk kerjasama yang terorganisir di dalam suatu federasi.

Antara awal tahun 1932 sampai pertengahan 1933 mulai ditandai dengan perpecahan gerakan nasionalis dan adanya kegagalan untuk pengintegrasian atau penyatuan organisasi-organisasi nasionalis, serta aksi politik yang semakin meningkat. Di tahun-tahun ini gerakan nasionalis lebih kontra produktif.

Tahun 1933 pemerintah kolonial mulai membubarkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh masyarakat, karena dianggap bahwa ucapan-ucapan yang ada di dalam rapat tersebut dipandang sebagai suatu hasutan untuk memberontak kepada pemerintah Belanda. Pembubaran rapat-rapat ini misalnya di daerah Surabaya, Purworejo, Probolinggo, Cilacap, Kebumen, dan daerah lainnya.<sup>6</sup>

Pembubaran rapat-rapat ini di lain pihak menguntungkan pihak Indonesia terutama partai yang bersifat radikal seperti Partindo, karena hal ini merupakan propaganda yang baik. Keuntungan ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang bergabung dengan partai Partindo ini. Tetapi kemudian pada tanggal 27 Juni 1933 dikeluarkan keputusan Gubernur untuk menentukan larangan bagi pegawai negeri menjadi anggota partai Partindo.<sup>7</sup>

Pelaksanaan politik keras dan reaksioner oleh pemerintah Hindia Belanda telah memberikan dampak yang luas terhadap sifat dan arah perjuangan kaum nasionalis. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan larangan diadakannya

---

<sup>6</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *op. cit*, hal. 91

<sup>7</sup> Setiadi Kartohadikusumo, *Soetardjo "Petisi Soetardjo" dan Perjuangannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1990, hal. 117-118.

rapat-rapat umum, pengetatan pengawasan polisi rahasia, dan pers. Hal inilah yang membuat perjuangan kaum nasionalis yang bersifat radikal sering mengalami kegagalan.<sup>8</sup>

Keadaan ekonomi yang sudah mulai normal pada tahun 1936 membuat harga barang-barang hasil bumi tanah jajahan mulai naik. Meskipun hidup rakyat mengalami perbaikan sesudah tekanan hidup yang berat terutama di daerah perkebunan karet namun mereka belum makmur dalam arti sebenarnya. Keadaan ini hanya menguntungkan kaum eksportir yaitu orang-orang Eropa.<sup>9</sup>

Pemerintah kolonial tetap tidak bersedia memulihkan kebebasan-kebebasan politik. Pemerintah kolonial masih menganggap bahwa tanah jajahan belum dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah kolonial. Hal ini jelas terlihat dari kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jendral de Jonge (1931-1936). Politiknya terkenal bersifat sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. Bahkan Gubernur Jendral de Jonge pernah berkata “kami telah memerintah negeri ini selama 300 tahun dengan kelewang dan cambuk, dan akan meneruskan memerintah negeri ini 300 tahun lagi”.<sup>10</sup>

Peraturan mengenai larangan berkumpul dan rapat, hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan “eksteministis”, hak-hak membuang dan menginternir terhadap kaum nasionalis radikal, dan menciptakan peraturan *Toezicht Ordonnantie* (Ordonansi Pengawasan). *Toezicht Ordonnantie* adalah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> J. M Pluvier, *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia*, tanpa tahun, hal. 45

<sup>10</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I : Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajari*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hal. 58.

menolak ijin untuk menyelenggarakan pengajaran apabila dipandang membahayakan ketertertiban masyarakat. Ini semua adalah peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral de Jonge.<sup>11</sup>

Gubernur Jendral de Jonge juga menjalankan politik purifikasi atau pemurnian. Purifikasi berarti penumpasan segala hal yang mempunyai kecenderungan ke arah radikalisme dengan agitasi massa dan semua bentuk nonkooperasi. Dengan adanya purifikasi ini maka partai-partai yang berhaluan keras seperti gerak-gerik dari Partindo dan PNI Baru selalu diawasi secara ketat.<sup>12</sup>

Politik non-kooperasi di bawah tekanan Gubernur Jendral de Jonge menjadi lumpuh. Hal ini mengakibatkan munculnya ko-operator yang berasal dari *Volksraad* (Dewan Rakyat) oleh Fraksi Nasional dan di luar *Volksraad* oleh Partai Indonesia Raya (Parindra).

Pengganti dari Gubernur Jendral de Jonge adalah Alidius W. L Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936-1945), penggantian ini terjadi karena Gubernur Jendral de Jonge tidak mampu menyesuaikan diri ke arah perubahan zaman, dia selalu menggunakan kekerasan di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Pada hal dari gerakan pihak nasional sudah ada usaha untuk menyesuaikan diri misalnya dengan menjalankan politik kooperasi yaitu bekerjasama dengan

---

<sup>11</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op. cit*, hal. 88.

<sup>12</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta, PT Gramedia, 1990, hal. 176.

pemerintah. Alidius W. L Tjarda van Starckenborgh Stachouwer dianggap oleh pemerintah Belanda mampu mengatasinya sesuai dengan perubahan jaman.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaannya, Alidius W. L Tjarda van Starckenborgh Stachouwer lebih luwes tetapi tidak membawa perubahan yang berarti. Sedangkan untuk Menteri Urusan Daerah Jajahan di Den Haag adalah Hendrikus Colijn (1933-1937). Hendrikus Colijn merupakan salah satu orang yang menentang ide-ide etis dan ia pernah menjadi Direktur Shell. Dengan keadaan yang seperti ini maka nasionalisme di Indonesia hanya mengalami kemajuan yang sedikit dan pada tahun 1930-an Belanda benar-benar menguasai Indonesia.<sup>14</sup>

Tindakan keras dari pemerintah Hindia Belanda mulai mengubah haluan kaum nasionalis yaitu dari yang bersifat nonkooperasi menjadi kooperasi. Selain karena tindakan pemerintah Hindia yang reaksioner, perubahan haluan ini juga diakibatkan oleh munculnya nazisme atau fasisme di Eropa Tengah, dan Jepang yang melakukan ekspansionisme di daerah Pasifik.<sup>15</sup>

Setelah tahun 1935 gerakan antikolonisme radikal yang berdasarkan asas nonkooperasi benar-benar padam, tetapi metode-metode yang bersifat nonkooperasi belum sepenuhnya tertutup. Pada bulan Desember 1935, partai-partai yang moderat dan pada dasarnya berbau Jawa, Persatuan Bangsa Indonesia dan Budi Utomo berfusi membentuk Parindra (Partai Indonesia Raya). Tujuannya yaitu kemerdekaan pada akhirnya kerja sama dengan Belanda. Ketua Parindra ini

---

<sup>13</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *op. cit*, hal. 180

<sup>14</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, PT Ikrar Mandiriabadi, 2005, hal. 388.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 180-181.

adalah Sutomo, kemudian tokoh-tokoh pergerakan lainnya juga bergabung, seperti Thamrin. Partai ini merupakan organisasi kaum konservatif yang bersifat sekuler atau anti Islam.<sup>16</sup>

Di tahun yang sama kondisi sosial ekonomi di Indonesia mulai membaik. Kehidupan ekonomi Indonesia telah pulih seperti sebelum krisis, meskipun taraf kemakmurannya belum seperti sedia kala. Dengan memulihnya ekonomi dan sosial Indonesia maka kaum pergerakan mengharapkan agar hak-hak politik berdasarkan paham demokrasi mulai dipulihkan dan berbagai pembatasan hak berserikat serta berkumpul supaya dihilangkan.<sup>17</sup>

Berbagai lapisan rakyat mulai melakukan pergerakan untuk mendesak pemerintah Hindia Belanda melakukan pembaharuan yang demokratis. Tuntutan penting yang menghendaki pembaharuan itu ialah apa yang di kenal dengan Petisi Soetardjo dan mosi Wiwoho,<sup>18</sup> yang keduanya diajukan lewat serta dengan dukungan *Volksraad* (Dewan Rakyat).<sup>19</sup> Mosi Wiwoho mengalami kegagalan di dalam perjuangannya. Tidak lama setelah itu Soetardjo dan teman-temannya mengajukan suatu usulan kepada pemerintah yang diberi nama Petisi Soetardjo.

Petisi Soetardjo yang diajukan pada tahun 1936 berisi agar diadakan sidang permusyawaratan, dari wakil-wakil Nederland dan India Nederland atas

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 394.

<sup>17</sup> G. Moedjanto, *op. cit*, hal. 63.

<sup>18</sup> Mosi Wiwoho menginginkan dipercepatnya penyelesaian masalah ketatanegaraan Hindia Belanda, antara lain pengembangan Dewan Rakyat sebagai lembaga demokratis yang bulat, pertanggungjawaban kepala-kepala departemen kepada Dewan Rakyat. Untuk membuat perubahan ketatanegaraan perlu dibentuk suatu Dewan Kerajaan dan dibentuk suatu panitia yang mengadakan penelitian tentang situasi politik di Hindia Belanda.

<sup>19</sup> *Ibid*

dasar kesamaan kedudukan untuk menyusun rencana pemberian hak berdiri sendiri (otonomi) dalam waktu 10 tahun. Petisi ini ditandatangani oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, Said Abdoellah bin Salim Alatas (perwakilan Arab/Islam), Datuk Toemenggoeng Ara Abas Soerja Nata Atmadja (perwakilan Sumatra/Islam), Dr Ratulangi (perwakilan Sulawesi/Kristen), I. J Kasimo (perwakilan Jawa/Katolik) dan Kwo Kwat Tiong (perwakilan Cina/Budha/Konfusius).<sup>20</sup>

Petisi yang mereka ajukan ini di beri nama Petisi Soetardjo karena berdasarkan penandatanganan pertamanya yaitu Soetardjo Kartohadikoesoemo. Soetardjo adalah seorang Ketua Persatuan Pegawai Binnelands Bestuur/Pamongpraja Bumiputra (PPBB) dan wakil dari organisasi ini dalam sidang *Volksraad* pada bulan Juli 1936.

Petisi Soetardjo merupakan suatu bentuk dorongan kepada rakyat untuk terlibat dalam membangun negeri. Semangat ini ditunjukkan dengan adanya suatu penyusunan perencanaan yang matang dalam menentukan hubungan antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda, dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) terhadap petisi ini terbelah menjadi dua yaitu yang mendukung dan menolak. Anggota yang menerima atau setuju berjumlah 26 suara dan yang menolak atau tidak setuju berjumlah 20 suara. Banyaknya dukungan terhadap petisi ini berasal dari wakil-wakil Indo-Eropa,

---

<sup>20</sup> Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 1995, hal. 744

Arab, dan Cina. Dengan adanya banyak dukungan ini maka di dalam kalangan Dewan Rakyat Petisi Soetardjo berhasil. Tetapi pemerintah Belanda pada akhirnya menolak Petisi Soetardjo yaitu pada tanggal 29 November 1938, sehingga Petisi Soetardjo mengalami kegagalan. Penolakan dari Ratu Belanda terhadap petisi ini telah membuat kekecewaan yang besar di pihak Indonesia terutama Soetardjo dan teman-temannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936 ?
2. Bagaimana reaksi rakyat terhadap Petisi Soetardjo ?
3. Bagaimana reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Menganalisis secara mendalam tentang Petisi Soetardjo tahun 1936 sebagai sumbangan dalam sejarah Indonesia.

#### **b. Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong lahirnya Petisi Soetardjo tahun 1936.

- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis reaksi rakyat terhadap Petisi Soetardjo
- 3) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yaitu bahwa penelitian untuk ilmu pengetahuan sosial.

### b. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan menambah informasi tentang sejarah nasional Indonesia khususnya tentang Petisi Soetardjo tahun 1936.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang Petisi Soetardjo tahun 1936.

## D. Tinjauan Pustaka

Sumber merupakan unsur pokok dalam penulisan sejarah. Sumber tertulis maupun sumber lisan dapat dibagi atau dikategorikan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dapat berupa kesaksian dari pelaku utama peristiwa sejarah itu sendiri dan bisa juga didapat dari saksi mata yang langsung terlibat ataupun menyaksikan secara langsung suatu peristiwa sejarah

terjadi. Sumber primer dapat juga berupa dokumen-dokumen yang sifatnya resmi pada masa peristiwa itu terjadi. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi utama atau sumber yang berasal dari tangan kedua bisa berupa hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian seorang saksi utama ataupun pelaku.

Adapun sumber-sumber yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Pertama adalah *Soetardjo “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya*, yang disusun oleh Drs. Setiadi Kartohadikusumo, tahun 1990. Buku ini semacam biografi Soetardjo. Soetardjo Kartohadikoesoemo. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pamong praja. Riwayat kepamongprajaan dimulai sebagai pembantu juru tulis di sebuah kantor kecamatan di jaman pemerintahan Belanda, kemudian sebagai *Syucokan* (residen) di jaman pemerintahan Jepang dan berakhir sebagai gubernur dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dr. Soetardjo Kartohadikoesoemo pada masa pemerintahan Belanda menjadi anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) dan perjuangannya di Dewan Rakyat mencapai puncaknya ketika diajukannya sebuah petisi yang kemudian di kenal dengan nama “Petisi Soetardjo”. Petisi ini berisikan desakan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam jangka waktu sepuluh tahun di dalam batas-batas yang sudah ditetapkan dalam pasal 1 *Grondwet* (Undang-undang Kerajaan Belanda).

Kedua adalah *Hindia Berdiri Sendiri : Oesoel Petisi Soetardjo dan Pembijaraan dalam Volksraad*. Salinan Hadji A. Salim. Buku ini berisi tentang pembicaraan antara anggota Dewan Rakyat terutama Soetardjo Kartohadikoesoemo dengan pemerintah Hindia Belanda mengenai persetujuan petisi Soetardjo dan pidato-pidato yang dilakukan oleh para penandatangan Petisi Soetardjo dan pemerintah mengenai Petisi Soetardjo.

Ketiga adalah *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia Th. 1930-1942*, yang disusun oleh J. M Pluvier. Buku ini berisi tentang latar belakang masyarakat kolonial sampai dengan sikap pergerakan nasional dan dalam penulisan ini hanya menggunakan pembahasan tentang pergerakan perkembangan koperatif sampai usul Petisi Soetardjo. Dalam buku ini di katakana bahwa Petisi Soetardjo merupakan suatu manifestasi dari keinginan untuk bekerjasama dengan Gubernemen dan Nederland yang demokratis.

Keempat adalah *Sejarah Nasional Indonesia V*, yang disusun oleh Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, tahun 1982/1983. Buku ini berisi tentang politik kolonial Belanda dan transformasi politik sampai dengan komunikasi sosial dan edukasi. Penulisan skripsi ini hanya menggunakan pembahasan tentang pergerakan nasional yang di dalamnya terdapat pengajuan Petisi Soetardjo. Di sini dijelaskan tentang keadaan Indonesia pada dasawarsa terakhir Hindia Belanda (1930-1942). Indonesia yang terkena dampak dari krisis ekonomi dunia dimanfaatkan benar oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga rakyat semakin menderita. Pemerintah kolonial Belanda

melakukan tindakan-tindakan yang reaksioner terhadap perpolitikan Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi dari golongan nasionalis maupun dari anggota Dewan Rakyat.

Kelima adalah *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*, yang disusun oleh Sartono Kartodirdjo, tahun 1990. Buku ini berisi politik kolonial Belanda sampai dengan sejarah analitik struktural nasionalisme Indonesia. Dalam buku ini terdapat bagian yang membahas tentang Petisi Soetardjo.

Keenam adalah *Indonesia Abad Ke-20 I*, disusun oleh G. Moedjanto, tahun 1988. Buku ini berisi tentang latar belakang sejarah sampai dengan persetujuan Linggajati. Maksud kajian dalam buku ini adalah krisis pergerakan pada tahun 1930-1935. Tuntutan penting yang menghendaki adanya perubahan ialah Petisi Soetardjo yang diajukan lewat dan dengan dukungan *Volksraad* (Dewan Rakyat).

Ketujuh adalah *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, disusun oleh M. C. Ricklefs, tahun 2005. Buku ini berisi tentang lahirnya zaman modern sampai Indonesia merdeka. Buku ini juga membahas tentang Petisi Soetardjo. Petisi Soetardjo yang diilhami dari kasus Filipina.

Kedelapan adalah *I. J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, karangan Tim wartawan Kompas dan Redaksi penerbit Gramedia, tahun 1980. Buku ini berisi tentang masa kecil I. J. Kasimo sampai dengan salus populi *suprema lex*. Pada bagian di dalam perjuangan di dalam *Volksraad* dijelaskan keikutsertaan I. J.

Kasimo dalam menandatangani Petisi Soetardjo. Kasimo mempunyai dua alasan mengapa ia bersedia menandatangani petisi ini. Alasannya yaitu alasan yang prinsipil dan alasan ekonomi. Untuk mendukung petisi Soetardjo maka dibentuk Sentral Komite Petisi Soetardjo yang dipimpin oleh Mr. Sartono, dan Kasimo menjadi anggotanya

### **E. Landasan Teori**

Dalam membahas permasalahan yang ada maka perlu diketahui mengenai definisi atau judul dari skripsi ini. Pengertian dari judul skripsi ini dimaksudkan agar pemahaman terhadap skripsi ini lebih mudah dilakukan. Skripsi ini berjudul “Petisi Soetardjo Tahun 1936”.

Dalam penelitian ini teori yang relevan berfungsi sebagai tuntunan untuk menjawab, memecahkan atau menerangkan masalah yang telah diidentifikasi itu. Dalam penelitian sejarah teori yang digunakan biasanya disusun sesuai dengan pendekatan apa dan bidang sejarah mana yang akan diteliti. Penulisan sejarah memiliki bentuk disiplin lain untuk mengetahui teori. Dalam penulisan ilmiah menggunakan teori-teori ilmu-ilmu sosial dan dalam petisi ilmu sosial meminjam teori konflik dan struktural fungsional. Untuk kajian politik adalah menggunakan teori kekuasaan dari ilmu politik.

#### **1. Teori Konflik**

Teori konflik adalah satu perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-

bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan yang sebesar-besarnya.<sup>21</sup>

Pada dasarnya pandangan teori konflik tentang masyarakat tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsionalisme structural karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai suatu system yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan keduanya terletak pada asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut fungsionalisme structural, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat dapat berjalan secara normal. Sedangkan menurut teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga mereka saling berjuang satu sama lain.<sup>22</sup>

Menurut Dahrendorf yang dikutip oleh Bernard Raho SVD menyebutkan bahwa otoritas atau kekuasaan didalam suatu perkumpulan bersifat dialektif. Dalam setiap perkumpulan hanya akan terdapat dua kelompok yang bertentangan, yakni kelompok yang berkuasa atau atasan dan kelompok yang dikuasai atau bawahan. Mereka yang berada dikelompok atas ingin tetap mempertahankan status quo. Sedangkan mereka yang dikuasai ingin supaya ada perubahan. Konflik ini selalu ada dalam

---

<sup>21</sup> Bernard Raho SVD, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007, hal. 71

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 71-72

setiap kehidupan bersama atau perkumpulan atau negara walaupun semungkin secara tersembunyi.<sup>23</sup>

Menurut Jonatahn Turner yang dikutip oleh Bernard Raho SVD, ia lebih memusatkan perhatiannya pada konflik sebagai suatu proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih. Dia menjelaskan sembilan tahap menuju konflik terbuka.<sup>24</sup>

- a. Sistem sosial yang saling berhubungan.
- b. Terdapat ketidak-seimbangan pembagian kekuasaan atau sumber penghasilan.
- c. Unit-unit yang tidak berkuasa mulai mempertanyakan legitimasi system tersebut.
- d. Kesadaran bahwa mereka harus mengubah system demi kepentingan mereka.
- e. Kesadaran menyebabkan mereka secara emosional terpancing untuk marah.
- f. Kemarahan sering meledak begitu saja tanpa terorganisir.
- g. Keadaan demi menyebabkan mereka semakin tegang.
- h. Ketegangan yang semakin hebat menyebabkan mereka mencari jalan untuk mengorganisir diri guna melawan kelompok yang berkuasa.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 79-80

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 81-82

- i. Akhirnya konflik terbuka bisa terjadi antara kelompok yang berkuasa dan tidak berkuasa.

Teori konflik ini untuk melihat pertentangan antara pihak Hindia Belanda dengan pemerintah Belanda di dalam pengajuan Petisi Soetardjo dan ini terlihat terutama di dalam perdebatan yang terjadi di Dewan Rakyat (*Volksraad*). Dari sembilan tahap konflik yang terjadi penyelesaian untuk pengajuan Petisi Soetardjo ini diselesaikan dengan adanya penolakan oleh pemerintah Belanda terhadap petisi. Dengan ditolaknya petisi maka berhenti juga perjuangan mereka memperjuangkan Petisi Soetardjo, tetapi mereka masih memperjuangkan nasib rakyat dengan cara yang lain.

### 2. Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.<sup>25</sup>

Kekuasaan sosial menurut Robert M. Maclver yang dikutip oleh Miriam Budiarjo adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan sosial terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, dalam

---

<sup>25</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2005, hal. 35.

arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah, satu pihak yang memberi perintah dan satu pihak yang mematuhi perintah. tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi dari pada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan.<sup>26</sup>

Di antara banyak bentuk kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasaan politik. Dalam hal ini kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik merupakan sebagian saja dari kekuasaan sosial yakni kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada Negara sebagai satu-satunya pihak berwenang yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial dengan paksaan.<sup>27</sup>

Teori kekuasaan digunakan untuk melihat ketidaksetujuan pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo dan ini dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan Kerajaan Belanda No. 40 pada tanggal 26 November 1938 tentang penolakan petisi Soetardjo. Di sini dengan kekuasaannya Belanda bertindak sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan bagaimana penderitaan yang di dapat oleh rakyat.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 35-36.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 37.

## F. Metodologi Penelitian

Dalam skripsi ini metodologi penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek pemikiran pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif analitis memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari penulisan deskriptif analitis ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup>

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah kerja dalam rangka membuat analisis dan sintesis atas permasalahan yang dikaji. Terdapat lima langkah di dalam mengkaji permasalahan yaitu:<sup>29</sup>

#### a. Perumusan Judul

Judul atau topik yang ditentukan dalam penulisan ini adalah Petisi Soetardjo Tahun 1936. Topik ini menarik untuk diteliti karena Petisi Soetardjo merupakan salah satu bentuk perjuangan rakyat Indonesia. Selain itu dengan meneliti dan menulis topik tersebut akan bermanfaat bagi para

---

<sup>28</sup> Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, hal. 63.

<sup>29</sup> Prodi Pendidikan Sejarah, *Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Sejarah*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2007, hal. 43.

pembaca yang pada umumnya hanya mengetahui tokoh-tokoh pejuang yang terkenal seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan lain-lainnya.

b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Heuristik adalah kegiatan peneliti memilih subyek untuk diteliti dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Belanda. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari literatur yang terdapat di perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan perpustakaan Kolose Kota Baru yang berupa buku pustaka. Sumber primer adalah keterangan langsung dari pelaku sejarah (narasumber), selain itu dapat berupa arsip-arsip sejarah, tulisan-tulisan asli pelaku sejarah maupun dokumen-dokumen resmi. Sumber sekunder yaitu yang bukan keterangan langsung dari pelaku sejarah.

c. Verifikasi

Setelah semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul maka segera dilakukan kritik terhadap sumber yang sudah diambil. Kritik sumber atau verifikasi adalah pengujian dari sumber-sumber sejarah, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (bisa dipercaya) sumber tersebut.<sup>30</sup>

Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber dengan melihat

---

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, 1995, *Pengantar Ilmu Sejarah* Yogyakarta, Bentang Budaya, hlm. 99-100.

keaslian kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui otentisitasnya. Setelah melihat sumber tersebut autentik maka sumber akan diteliti kembali untuk melihat apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kritik intern dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh fakta yang kongkrit.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kredibilitas sumber digunakan metode perbandingan yaitu membandingkan satu sumber dengan sumber yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk melihat sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak.

d. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan menganalisis sumber yang bertujuan untuk mengurangi unsur subyektifitas dalam penulisan suatu sejarah, selalu ada yang dipengaruhi jiwa jaman, kebudayaan pendidikan, lingkungan sosial dan yang melingkupi penulisnya.<sup>31</sup> Analisis sumber yang dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada atau dengan cara menguraikan informasi yang ada dan mengkaitkannya antara yang satu dengan yang lainnya.

e. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian, di mana setelah melalui proses verifikasi dan interpretasi, maka data yang telah valid

---

<sup>31</sup> Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 72.

dituangkan dalam suatu tulisan sejarah. Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas perjalanan sejarah yang utuh.<sup>32</sup> Tulisan ini menggambarkan perjuangan anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) dalam memperoleh otonomi Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

### 2. Pendekatan

Pendekatan adalah pola pikir yang membantu untuk memecahkan permasalahan penelitian.<sup>33</sup> Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan politik, sosial, dan ekonomi. Pendekatan politik digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini, karena penelitian tentang Petisi Soetardjo tahun 1936 ini termasuk dalam kategori sejarah politik. Pendekatan politik digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang latar belakang pengajuan Petisi Soetardjo. Sedangkan pendekatan sosial dan ekonomi digunakan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu. Hal-hal inilah yang melahirkan gagasan para anggota *Volksraad* untuk mengajukan petisi.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 60-61

<sup>33</sup> Prodi Pendidikan Sejarah, *op. cit*, hal. 44.

**G. Sistematika Penulisan**

Skripsi yang berjudul Petisi Soetardjo tahun 1936 ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936.

Bab ini berisi tentang faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936.

Bab III : Reaksi rakyat terhadap Petisi Soetardjo.

Bab IV : Reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab II, III, dan IV

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat dicermati bahwa penulis ingin menyajikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936, reaksi rakyat terhadap Petisi Soetardjo, dan reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo.

## BAB II

### FAKTOR-FAKTOR PENDORONG

#### MUNCULNYA PETISI SOETARDJO TAHUN 1936

Pemerintah kolonial yang pernah menjajah bangsa Indonesia terutama Belanda telah membuat rakyat Indonesia menderita dalam segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang sosial. Penderitaan yang dialami oleh rakyat ini mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan nasional yang bersifat kooperasi maupun non-kooperasi, dan dengan cara berperang ataupun diplomasi. Tujuan mereka sama yaitu agar Indonesia merdeka dan lepas dari segala penindasan yang dilakukan oleh penjajah.

Perjuangan dilakukan dari berbagai lapisan masyarakat dan mereka membentuk organisasi-organisasi yang mendukung perjuangannya. Di lain pihak mereka yang duduk di dalam pemerintahan Hindia Belanda seperti anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) juga melakukan perjuangan dengan cara mereka sendiri. Perjuangan para anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) ini diwujudkan dalam Petisi Soetardjo pada tahun 1936.

Petisi Soetardjo muncul dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya Petisi Soetardjo.

### A. Faktor Politik

Pada tahun 1930-an politik pemerintah Belanda lebih mengarah ke kanan. Hal ini terlihat dari gubernurnya yaitu Bonifacius C. de Jonge. Bonifacius C. de Jonge merupakan seorang mantan menteri peperangan dan Direktur Royal Dutch Shell. Ia adalah orang yang menentang semua bentuk nasionalisme dan ia tidak ingin melihat *Volksraad* memainkan peranan penting. Rapat-rapat politik orang Indonesia sering sekali dibubarkan oleh pihak polisi dan para pembicaranya ditangkap.<sup>34</sup>

Dalam pikiran de Jonge para nasionalis adalah musuh yang berusaha menerobos dan merobohkan pemerintahan kolonial yang dijalkannya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain melumpuhkan pergerakan mereka. Dengan melumpuhkan gerakan nasional yang radikal maka hilanglah musuh mereka. Secara tidak langsung de Jonge juga memaksa sikap kooperatif kepada tiap gerakan nasional yang ada. Artinya tidak ada gerakan rakyat yang anti Belanda dan tidak ada perbuatan yang anti pemerintah. Semua orang jajahan dalam segala gerakannya harus loyal terhadap pemerintah. Tindakan yang tidak loyal terhadap pemerintah diancam dengan penangkapan atau pembunuhan.<sup>35</sup>

Keadaan ekonomi yang buruk menambah kekhawatiran pemerintah karena rakyat akan menjadi orang yang peka dan mudah dipengaruhi oleh para pemimpin

---

<sup>34</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hal. 388.

<sup>35</sup> Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, Jakarta, Inti Idayu Press, 1986, hal. 51.

pergerakan. Untuk mencegah kejadian seperti ini maka pemerintah menindak partai-partai yang non kooperatif.

Pemerintah melakukan represi dengan ketat, artinya baik “mulut” dan “kaki” benar-benar dibungkam dan diikat. Pemerintah berusaha melakukan kontrol ketat dengan memperkuat *Politieke Inlichtingen Dienst* atau Dinas Rahasia yang berusaha mengorek berita sedetail mungkin hingga memperoleh kepastian bahwa seseorang dicurigai dan seterusnya dikenakan sanksi pembuangan. Tempat-tempat pengasingan atau pembuangan ini seperti di daerah Digul, Bangka, Biliton, Ende, Bandaneira, Bengkulu, Padang, dan lain-lainnya.<sup>36</sup>

Gubernur Jenderal de Jonge melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin politik dengan berbagai cara. Pemimpin politik yang ditangkap seperti Ir. Soekarno ditangkap dan diasingkan dari Flores kemudian ke Bengkulu, Moh. Hatta dan Sjahrir yang diasingkan ke Digul.<sup>37</sup> Sementara itu dilakukan penyerbuan secara terus menerus terhadap pertemuan-pertemuan atau tokoh-tokoh pergerakan, dan penggedahan kesemuanya ini sesuai dengan politik Colinj dan de Jonge yang hendak menghancurkan partai-partai radikal.

Politik keras yang dijalankan oleh Colinj dan de Jonge dapat dikatakan berhasil karena partai mulai kehilangan anggotanya dan kontak dengan masyarakat umum mulai menghilang. Untuk menghindari agar gerakan nasional tidak mengalami kepunahan atau kehancuran maka diperlukan suatu taktik dan

---

<sup>36</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994, hal. 86-87

<sup>37</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 90.

strategi perjuangan yang baru. Salah satu caranya dengan mengadakan kerjasama antar organisasi-organisasi pergerakan nasional dan ini akan semakin mendorong rasa persatuan untuk mencapai Indonesia merdeka.

Dengan adanya penangkapan terhadap para pemimpin politik maka timbul banyak reaksi dari golongan masyarakat. Di dalam Dewan Rakyat pada bulan Januari 1930, Muhammad H. Thamrin (1894-1941) memimpin kaum Betawi untuk membentuk kelompok Nasional (*Nationale Fractie*) dengan anggotanya dari Jawa dan luar Jawa. Tujuannya yaitu untuk memperjuangkan semacam bentuk otonomi Indonesia di dalam kerjasama dengan Belanda. Sedangkan di Surabaya pada bulan Oktober 1930 Sutomo mereorganisasi Study Clubnya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Organisasi ini beralih ke bidang-bidang kegiatan ekonomi dan sosial di Jawa Timur, seperti mendirikan balai-balai pengobatan-pengobatan, asrama-asrama mahasiswa, bank-bank desa, biro-biro penasihat, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Partai-partai yang ada pada waktu itu kemudian terpaksa mengurangi sikap kerasnya kepada pemerintah, sehingga sesudah tahun 1930 partai-partai pada umumnya bersifat lunak atau moderat. Partai-partai ini dibiarkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena :<sup>39</sup>

1. Semangat demokrasi yang tumbuh menyala sesudah Perang Dunia I, mendorong pemerintah membiarkan adanya partai-partai sekedar sebagai

---

<sup>38</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit*, hal. 388

<sup>39</sup> G. Moedjanto, *op. cit*, hal. 58.

dalih bahwa di koloni hak-hak demokrasi dijamin. Apabila pergerakan sama sekali dilarang, mungkin aspirasi rakyat akan disalurkan lewat kekerasan.

2. Partai-partai yang moderat meskipun tujuannya tetap Indonesia merdeka, tetapi gerak gerik mereka menaati peraturan yang ada.
3. Ada kemungkinan partai-partai itu dapat diajak kerjasama menghadapi bahaya dari luar.

Selain partai-partai dan organisasi-organisasi pergerakan yang diawasi, pers yang ada di Indonesia pada waktu itu juga diawasi dengan ketat dan apabila diketahui tulisan-tulisannya bertujuan menentang pemerintah Belanda maka akan dibekukan dan tidak boleh beroperasi lagi. Pembekuan terhadap pers ini membuat rakyat semakin tidak mengetahui perkembangan yang terjadi mengenai pergerakan nasional.

Pergerakan tahun 1930-an sudah meninggalkan prinsip nonkooperasi dan bergerak secara parlementer, artinya menerima dan duduk di dalam dewan perwakilan. Pidato yang membakar semangat rakyat sudah tidak ada lagi, sebaliknya kaum moderat memilih jalan untuk tetap mencari jalan dalam parlemen. Keadaan seperti ini terjadi karena kekuatan fisik telah dilumpuhkan dan yang ada tinggal idealisme yang tinggi dan semangat untuk tetap mengkomunikasikan cita-cita kebangsaannya.<sup>40</sup>

Setelah tahun 1934, gerakan antikolonialisme radikal yang didasarkan pada asas nonkooperasi benar-benar padam. Tetapi metode-metode yang bersifat

---

<sup>40</sup> Suhartono, *op. cit.*, hal. 87

kooperasi belum sepenuhnya tertutup. Ide-ide nasionalis dan perasaan tidak puas terhadap pemerintahan kolonial Belanda juga dirasakan oleh kelompok-kelompok yang dekat dengan pemerintah. Mereka inilah yang duduk di Dewan Rakyat dan perjuangannya dapat dilihat dari usulan yang mereka ajukan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1936 yang terkenal dengan nama Petisi Soetardjo.

Petisi Soetardjo diajukan juga berdasarkan atas apa yang telah dijanjikan oleh pemerintah Belanda terhadap Hindia Belanda bahwa Hindia Belanda sederajat dengan Belanda. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1918 Parlemen Belanda melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam perubahan tersebut pemerintah Belanda tidak lagi menyebutkan bahwa Hindia Belanda sebagai miliknya melainkan sederajat. Tetapi pada kenyataan tidak banyak perubahan yang terjadi, kecuali munculnya *Volksraad* sebagai Dewan Rakyat yang tidak memiliki wewenang yang berarti. Dewan Rakyat ini hanya sebagai tempat bersuara partai politik yang berhaluan kooperasi, bersama wakil dari golongan Belanda, Cina, dan Arab. Dengan alasan inilah Soetardjo dan teman-temannya menuntut agar Hindia Belanda memiliki parlemen sendiri dan diberi kedudukan yang sama dengan Belanda (*Dominion Status*).<sup>41</sup>

Landasan usul Petisi Soetardjo adalah pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa kerajaan Nederland meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao. Wilayah-wilayah ini

---

<sup>41</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op. cit*, hal. 226

dianggap oleh para penandatangan Petisi Soetardjo terutama Soetarjo mempunyai derajat yang sama dengan Nederland.

## **B. Faktor Ekonomi**

Perekonomian di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1929 mengalami depresi hebat dan menjalar ke negara-negara lainnya termasuk Hindia Belanda. Hal inilah yang menyebabkan lembaga-lembaga perekonomian ambruk, bank-bank tutup, dan pabrik serta perusahaan perkebunan bangkrut.<sup>42</sup>

Pada bulan Oktober 1929 Hindia Belanda menjadi negara pengeksport, terutama minyak bumi dan pertanian. Ini dapat dilihat dari tahun 1930 produk-produk Indonesia seperti minyak bumi dan pertanian diekspor sebanyak 52 % ke negara-negara industri Eropa dan Amerika Utara. Krisis ekonomi yang ada di kedua negara ini berakibat diberlakukannya kebijakan proteksi (politik melindungi) secara menyeluruh dan harga-harga yang menurun.<sup>43</sup>

Harga rata-rata barang ekspor Hindia Belanda menurun drastis pada tahun 1929. Volume ekspor juga mengalami penurunan karena menciutnya pasar dan diberlakukannya kebijakan proteksi. Hal ini menimbulkan dampak yang luas seperti industri minyak bumi menambah produksinya untuk mengatasi harga-harga yang sedang turun. Selain minyak bumi juga diberlakukan pada penjualan produksi karet, kopra, dan hasil tanam lainnya.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 85

<sup>43</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit*, hal. 384-385

Pada tahun 1932 harga karet hanya 16 % dari harga pada tahun 1929, selain itu harga gula juga mengalami penurunan yang sangat dratis. Penurunan harga gula membuat lahan garapan tebu dikurangi dengan cepat dan ini membuat para pekerja diberhentikan dan gaji yang dibayarkan dalam industri gula berkurang sampai 90 %. Orang-orang Jawa yang bekerja di Sumatra Timur mulai kembali kedaerahnya karena kesempatan kerja sudah tidak ada lagi. Pada tahun 1930 ada 336.000 pekerja kebun di Sumatra Timur, tetapi pada tahun 1934 terjadi penurunan jumlah pekerja yaitu menjadi 160.000 pekerja. Hal ini berakibat pada penurunan pendapatan Indonesia di luar Jawa yang merosot tajam di banding dengan daerah di Jawa.<sup>44</sup>

Turunnya barang-barang ekspor membuat impor Hindia Belanda juga mulai dikurangi, termasuk bahan makanan. Pendapatan pemerintah yang diperoleh dari retribusi dan pajak terhadap pemasukan dan pengeluaran membuat Batavia menghadapi krisis pendapatan. Selain itu juga dikarenakan pajak tanah yang dibayarkan rakyat Indonesia kepada pemerintah Belanda mengalami penurunan.

Jumlah perusahaan Barat juga mengalami penyusutan, dari 178 pabrik gula yang ada pada tahun 1928, tinggal 50 buah yang bekerja pada tahun 1934. Areal tebu menyusut dari 200.000 ha pada tahun 1931 menjadi 34.200 ha pada tahun 1934 atau produksinya menurun dari 2.923.550 ton menjadi 636.104 ton. Selain itu juga terjadi penyusutan pegawai dan buruh musiman dari 129.249 pada

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 385

tahun 1928 menjadi 28.632 pada tahun 1934. Kesulitan semakin kompleks di perkebunan tebu karena berkurangnya sewa tanah dan ini disampaikan di dalam *Volksraad* oleh Direktur Perkebunan. Harga barang kebutuhan merosot tajam, demikian pula dengan harga beras turun dari f 7,50 menjadi f 2,50 setiap pikul dan ini membuat penghasilan para petani susut sekitar 60 %.<sup>45</sup>

Keadaan ekonomi seperti ini membuat Hindia Belanda pada awal tahun tiga puluhan ekonominya semakin memburuk. Terjadi pengurangan-pengurangan kesempatan kerja, pemotongan gaji, turunnya harga-harga hasil pertanian dan rendahnya upah. Semua ini juga akibat dari satu pihak yang menjalankan penghematan secara besar-besaran dan lain pihak hendak mempertahankan pendapatan ekport terutama yang diperoleh dari hasil perkebunan.

Penderitaan yang dialami oleh rakyat dari segi perekonomian ini telah mendorong berbagai lapisan rakyat yang berasal baik dari organisai-organisasi maupun partai-partai untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Pelepasan penderitaan rakyat ini juga diperjuangkan oleh anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang duduk dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Perjuangannya dilakukan dengan pengajuan Petisi Soetardjo, yang ditandatangani oleh berbagai golongan masyarakat yang ada.

Kerjasama ekonomi antara Hindia Belanda dengan pemerintah Belanda akan berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan apabila diadakan perubahan susunan ketatanegaraan yang diusulkan oleh Petisi Soetardjo. Dengan

---

<sup>45</sup> Suhartono, *op. cit.*, hal. 86.

ekonomi yang stabil maka penderitaan rakyat akan berkurang, hal inilah yang akan diperjuangkan oleh Petisi Soetardjo.

### C. Faktor Sosial

Keadaan ekonomi yang memburuk membuat pemerintah Belanda mulai mengurangi pengeluaran untuk tanah jajahannya. Hal ini dilakukan supaya pemerintah tidak mengalami kerugian yang besar, tetapi masih dapat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahannya tersebut. Ekonomi yang buruk juga menimpa perusahaan-perusahaan besar, akibatnya mereka menurunkan upah tenaga kerja dan melakukan pemecatan secara besar-besaran, hal ini membuat rakyat semakin menderita.

Pemutusan hubungan kerja tidak hanya terjadi di Jawa tetapi juga terjadi di daerah lain, seperti Deli. Para pekerja Deli ini pun terpaksa pulang dengan membawa kesengsaraan dan kemiskinan. Di Sumatra dan Kalimantan petani karet mengalami depresi karena tindakan pemerintah yang membatasi produksi karet rakyat. Pembatasan ini juga semakin membuat rakyat menderita dengan diberlakukannya pajak yang sangat tinggi terhadap mereka.

Pada akhir Desember 1935 pajak yang dikenakan mencapai 95 % dan ini berarti rakyat hanya mendapatkan dua sen saja dari setiap kilogram karet. Kelaparan yang terjadi di Siak semakin membuat kerusuhan meningkat. Tetapi kerusuhan ini dapat diatasi oleh pemerintah. Selain itu dengan turunnya harga

penjualan beras membuat para petani harus melakukan penghematan untuk keperluan sehari-hari, seperti makan dan membeli pakaian.<sup>46</sup>

Para pekerja Indonesia cenderung kembali ke pertanian untuk menyambung hidupnya, namun banyak di antaranya tidak memiliki kesempatan itu sama sekali. Sebagian lahan yang tidak digunakan untuk produksi gula digunakan kembali untuk produksi padi, tetapi peningkatan produksi padi tidak sepenuhnya dapat menyediakan keperluan makanan dan pekerjaan bagi populasi yang terus menerus bertambah. Ketersediaan bahan makanan untuk per kapita menurun dari tahun 1930-1934, sehingga tidak diragukan lagi kesejahteraan rakyat Indonesia menurun.<sup>47</sup>

Para petani yang ada disekitar perkebunan-pekerbunan besar juga mengalami penderitaan. Di daerah tembakau misalnya, petani dilarang menanam kacang tanah oleh karena penyakit tanaman ini dapat merusak tembakau. Jika tiba masanya untuk menanam bagi perkebunan, maka petani harus segera mengosongkan tanahnya. Sekalipun tanamannya sendiri masih terlalu muda untuk dipanen. Dengan demikian maka para petani kehilangan kemerdekaannya untuk mengolah tanahnya sendiri. Selain itu harga sewa tanah pada waktu itu juga sangat tidak adil bagi para petani.<sup>48</sup>

Sistem pendidikan pada waktu itu bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga pribumi bagi pemerintah dan perusahaan asing. Ini dimaksudkan agar

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.86

<sup>47</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit*, hal. 387

<sup>48</sup> Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, *I. J. Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta, PT. Gramedia, 1980, hal. 39-40

jumlah tenaga impor yang sangat mahal dapat dibatasi dan pemerintah dapat melakukan penghematan dengan menggunakan tenaga pribumi yang murah.

Sistem pendidikan telah membuat orang pribumi keliru dalam mempergunakan tenaga dan pikirannya karena telalu menghargai jabatan pegawai negeri. Banyak anak golongan menengah setelah menyelesaikan pendidikannya lebih suka bekerja pada pemerintah atau perusahaan Belanda. Seharusnya mereka membantu perkembangan bangsa Indonesia kedepannya, karena pendidikan dapat membantu perkembangan penduduk di bidang kebudayaan, sosial dan ekonomi.<sup>49</sup>

Peraturan *Toezicht ordonnantie* (Ordonansi Pengawasan) dalam politik de Jonge sangat kurang memberi kesempatan bagi pribumi untuk menuntut pelajaran dan kebebasan pengajaran terancam. Ini membuat rakyat Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan semakin mengalami keterpurukan dan mudah terhasut.

Kondisi yang semacam ini telah mempertajam garis pemisah antara bangsa Belanda dan Indonesia menurut warna kulitnya. Kekayaan yang diperoleh bangsa Belanda dan sikapnya yang semakin tertutup semakin menjauhkan mereka dari rakyat.

Kondisi sosial rakyat yang memprihatinkan telah mendorong orang-orang Indonesia yang duduk di kursi Dewan Rakyat untuk menuntut suatu perubahan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar rakyat terlepas dari penderitaan. Mereka memberikan suatu usulan yang terkenal dengan nama Petisi Soetardjo.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 40

Dalam Petisi Soetardjo diperjuangkan kedudukan bangsa Indonesia agar sederajat dengan Belanda, sehingga tidak ada lagi jenjang sosial yang tinggi. Maksud dari persamaan derajat ini agar terjadi bentuk kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak baik Indonesia maupun Belanda. Dengan demikian beban rakyat akan berkurang dan kehidupan yang sejahtera akan tercapai.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial adalah faktor-faktor yang mendorong munculnya Petisi Soetardjo. Dalam faktor politik kemunculan Petisi Soetardjo dikarenakan oleh adanya penangkapan-penangkapan pembuangan terhadap orang-orang yang radikal oleh pemerintah Hindia Belanda terutama pada masa pemerintahan de Jonge. Penangkapan ini dilakukan karena mereka dianggap membahayakan pemerintahan Belanda di Indoensia.

Perekonomian dunia pada saat itu yang mengalami krisis membuat banyak lembaga-lembaga perekonomian yang ambruk, pabrik dan perusahaan juga mengalami kebangkrutan. Hal ini membuat pemerintah Belanda melakukan pemecatan terhadap para pekerja Indonesia dan melakukan pemotongan gaji terhadap pekerja. Penderitaan rakyat Indonesia semakin berat dengan dibebankannya pajak yang sangat tinggi terhadap mereka. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menutupi pengeluaran yang besar karena krisis ekonomi dunia.

### BAB III

#### REAKSI RAKYAT TERHADAP PETISI SOETARDJO

Petisi Soetardjo yang diajukan kepada pemerintah, Ratu, serta *Staten Generaal* (Parlemen) pada tanggal 15 Juli 1936 berisi permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan dijalankan secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaratan itu.

Petisi Soetardjo ini mendapat reaksi yang berbeda di kalangan rakyat Indonesia baik yang duduk di Dewan Rakyat (*Volksraad*) maupun di luar anggota Dewan Rakyat. Di dalam persidangan Dewan Rakyat Perdebatan pun terjadi antara para pendukung petisi dan yang menolak petisi (lihat lampiran hlm. 80). Sebagian besar anggota Dewan Rakyat mendukung dengan adanya Petisi Soetardjo, hal ini dapat dilihat dari pemungutan suara yang dilakukan untuk pemberian dukungan terhadap Petisi Soetardjo yaitu 26 suara mendukung dan sisanya yaitu 20 suara menolak adanya Petisi Soetardjo.

Keterangan lebih jelas mengenai reaksi rakyat Indonesia terhadap Petisi Soetardjo akan diterangkan di bawah ini. Reaksi terhadap Petisi Soetardjo berasal dari rakyat yang mendukung dan yang menolak Petisi Soetardjo.

### **A. Pendukung Petisi Soetardjo**

Petisi Soetardjo yang diajukan kepada pemerintah Belanda pada tahun 1936 melalui Dewan Rakyat mendapat reaksi yang berbeda-beda. Reaksi masyarakat yang mendukung Petisi Soetardjo antara lain :

1. Pers Indonesia seperti surat kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, dan majalah Soeara Katholik.

Dukungan pers seperti surat kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli, dan majalah Soeara Katholik terhadap petisi dibuktikan dengan mereka menyebarkan usul petisi, sehingga dengan adanya dukungan dari pers Indonesia terhadap Petisi Soetardjo ini maka mempercepat tersebarluasnya usul Petisi Soetardjo di kalangan rakyat umum. Dengan demikian rakyat dapat mengetahui dengan jelas dan memberi dukungan terhadap petisi agar diterima pemerintah kolonial dengan harapan penderitaan mereka akan berkurang atau bahkan tidak ada lagi apabila Petisi Soetardjo diterima oleh pemerintah.

Surat kabar Pemandangan mendukung atau menyokong Petisi Soetardjo karena petisi diajukan sangat tepat yaitu di saat akan digantinya Gubernur Jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda yang dianggap lebih berpaham liberal. Surat kabar Pemandangan juga memuat semua

pembicaraan di Dewan Rakyat yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini memudahkan rakyat di dalam memahami pengajuan Petisi Soetardjo kepada *Volksraad* serta mengikuti jalannya pembicaraan dalam Dewan rakyat.<sup>50</sup>

### 2. Pergerakan Penyadar

Pergerakan penyadar adalah perpecahan dari Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Anggota PSII yang mendirikan Pergerakan Penyadar ini keluar dari PSII karena pada awalnya berasal dari tindakan Abikusno Tjokrosujoso yang tidak memasukan Haji Agus Salim dalam jajaran pengurus PSII dan ini mengakibatkan pecahnya anggota PSII. Perpecahan di dalam tubuh PSII mengundang banyak keprihatinan para pemimpin partai. H. Agus Salim dengan segenap kesungguhannya mencoba menyadarkan teman-teman seperjuangannya akan bahaya yang akan muncul akibat perpecahan tersebut. Bersama yang lain gagasan untuk menyadarkan teman-teman seperjuangannya kemudian dilembagakan dalam satu organisasi baru yaitu Barisan Penyadar PSII.<sup>51</sup>

Pada tanggal 30 November 1936 diadakan musyawarah untuk memutuskan dan menetapkan bahwa Barisan Penyadar PSII telah memisahkan diri dari PSII dan mendirikan satu organisasi yang berdiri dengan nama Pergerakan Penyadar. Selain mempunyai kegiatan yang

---

<sup>50</sup> Nina H. Lubis, *Si Jalak Harapat*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 89-90

<sup>51</sup> Iin Nur Insaniwati, *Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*, Magelang, Indonesiatara, 2002, hal. 26.

bersifat ekonomi, Pergerakan Penyardar juga mempunyai kegiatan yang bersifat politis.

Kegiatan politik mereka dapat dilihat dari usaha Pergerakan Penyardar untuk mengumpulkan tanda tangan dalam rangka menguatkan usulan yang disampaikan oleh Sutardjo dan teman-temannya dalam *Volksraad* tanggal 15 Juli 1936. Pergerakan Penyardar mendukung Petisi Soetardjo dari Persatuan Pegawai-pegawai Binnelands Bestuur (PPBB) karena petisi ini berisi tuntutan yang sejalan dengan sikap Haji Agus Salim dan Mohamad Roem yang meminta agar dalam waktu sepuluh tahun diadakan konferensi untuk membicarakan Hindia Belanda berdiri sendiri.<sup>52</sup>

Latar belakang dukungan Pergerakan Penyardar terhadap Petisi Soetardjo sebenarnya adalah agar Pergerakan Penyardar memperoleh legitimasi politik dan landasan bergerak. Ini dilakukan karena menghebatnya penindasan terhadap gerakan kemerdekaan, jangankan menyebut kata “merdeka” menyebut kata “Indonesia” saja dilarang terlebih lagi jika diketahui dekat dengan anggota partai politik.

### 3. Partai Arab Indonesia (PAI)

Petisi Soetardjo mendapat dukungan dari Partai Arab Indonesia melalui putusan kongresnya yang kedua di Surabaya pada tanggal 25 Maret 1937. Dalam program politik Partai Arab Indonesia itu antara lain diputuskan hal-hal sebagai berikut yaitu Partai Arab Indonesia mempunyai

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

cita-cita juga seperti yang dikandung oleh bangsa Indonesia yaitu menuju Indonesia merdeka. Akan tetapi Partai Arab Indonesia yang mengakui kekuasaan Nederland pada masa ini menyetujui haluan bangsa Indonesia yang berpendirian akan mencapai kedudukan persamaan dengan Nederland sebagai negeri dan bangsa yang menguasai diri sendiri dalam perikatan persatuan dengan Nederland, seperti yang dikehendaki oleh Petisi Soetardjo itu. Maka kemerdekaan yang sepenuhnya bagi negeri dan bangsa Indonesia dalam keyakinan Partai Arab Indonesia tidaklah mengharuskan Indonesia lepas dari Nederland.<sup>53</sup>

#### 4. Kelompok Suroso

Kelompok Suroso terdiri dari wakil-wakil Fraksi Nasional yang mendukung Petisi Soetardjo, *Politiek Economische Bond* (PEB), *Indo-Europeesh Verbond* (IEV) dan beberapa nasionalis lainnya. Mereka berpendapat bahwa Indonesia sudah cukup matang dan sudah sepantasnya pemerintah Belanda memberikan lebih banyak hak-hak kepada Indonesia. *Indo-Europeesh Verbond* pada tahap pertama meminta supaya dibentuk suatu Dewan Kerajaan (*Rijksraad*), anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Indonesia dan Belanda yang bertugas akan menimbang setiap perselisihan antara Indonesia dan Belanda.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2004, hal. 185.

<sup>54</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hal. 229

5. R. Oto Iskandar di Nata

R. Oto Iskandar di Nata menyetujui Petisi Soetardjo karena pikiran yang disampaikan dalam petisi cocok dengan apa yang selama ini dipikirkan oleh R. Oto Iskandar di Nata. R. Oto Iskandar di Nata merupakan seorang pemimpin yang tidak lagi berwawasan kedaerahan yang picik, sangat memikirkan masalah yang berkaitan dengan kenegaraan secara luas. Ia setuju dengan usul perubahan susunan ketatanegaraan yang timbul sebagai akibat meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal de Jonge.<sup>55</sup>

6. Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda mendukung Petisi Soetardjo, bahkan mereka menerbitkan brosur-brosur mengenai petisi. Penyebaran brosur-brosur di negeri Belanda ini membuat orang-orang yang ada di negeri Belanda mengetahui perjuangan orang-orang Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat sehingga mereka harus mendukung perjuangan tersebut.

Perhimpunan Indonesia menyokong Petisi Soetardjo karena Perhimpunan Indonesia berpendapat bahwa untuk menghadapi ancaman fasisme terhadap negeri Belanda dan Indonesia maka adalah dipandang perlu untuk memperbaiki hubungan yang telah ada diantara kedua belah pihak. Hubungan yang baik antara Indoensia dan Belanda ini dapat terjalin

---

<sup>55</sup> Nina H. Lubis, *op. cit.*, hal. 88

dengan baik apabila pemerintah memenuhi maksud yang terkandung di dalam Petisi Soetardjo yaitu untuk mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda.<sup>56</sup>

### 7. Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi)

Di negeri Belanda selain organisasi Perhimpunan Indonesia ada juga organisasi Roekoen Peladjar Indonesia yang menyokong adanya Petisi Soetardjo. Roekoen Peladjar Indonesia yang ada di Belanda ini telah memperkenalkan petisi kepada para anggotanya dan orang-orang Belanda. Dengan demikian maka Petisi Soetardjo tidak hanya dikenal di Indonesia saja tetapi juga di negeri Belanda.<sup>57</sup>

### 8. Pagoejoeban Pasoendan

Dalam kongres Pagoejoeban Pasoendan di Sukabumi pada bulan April 1938 mengambil keputusan bahwa Pagoejoeban Pasoendan menyokong Petisi Soetardjo. Pagoejoeban Pasoendan mempunyai alasan kenapa mereka mendukung Petisi Soetardjo. Alasannya yaitu apabila Petisi Soetardjo diterima maka rakyat pribumi akan memperoleh banyak kesempatan untuk menyampaikan keinginannya dan tidak ada saling curiga di antara pemerintah Hindia Belanda dan pribumi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 231

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

9. Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)

Sikap Partai Gerakan Rakyat Indonesia terhadap Petisi Soetardjo sebenarnya setengah-tengah karena Gerindo hanya setuju tentang penyelenggaraan *Imperiale Conferentie* yang akan dihadiri oleh wakil-wakil Belanda dan Indonesia yang sederajat untuk merundingkan kedudukan Indonesia di masa depan. Selain itu Partai Gerakan Rakyat Indonesia tidak menyetujui tentang isi yang ada di dalam Petisi Soetardjo.<sup>59</sup>

10. Partai Indonesia Raya (Parindra)

Sama halnya dengan sikap Partai Gerakan Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Raya juga secara umum menolak Petisi Soetardjo karena maksud yang ada di dalam petisi berlawanan dengan tujuan yang telah dicita-citakan oleh partai-partai politik bangsa Indonesia yaitu Indonesia merdeka seutuhnya. Tetapi Parindra menyokong maksud Petisi Soetardjo tentang mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Sehingga Gerindo dan Parindra tidak sepenuhnya mendukung Petisi Soetardjo.<sup>60</sup>

**B. Rakyat yang Menolak Petisi Soetardjo**

Selain kelompok masyarakat yang mendukung adanya Petisi Soetardjo juga terdapat rakyat yang menolak Petisi Soetardjo. Mereka yang menolak

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal. 232.

<sup>60</sup> *Ibid*.

mempunyai alasan tertentu. Penolakan terhadap Petisi Soetardjo dapat dilihat seperti dibawah ini :

1. Anggota Dewan Rakyat terpecah di dalam menanggapi usul Petisi Soetardjo, mereka ada yang mendukung tetapi juga ada yang menolak dengan alasannya masing-masing. Mereka yang tidak setuju dengan adanya Petisi Soetardjo beralasan bahwa usul yang ada di dalam petisi tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak mempunyai kekuatan sehingga mudah digoyahkan, sehingga ketika diadakan pemungutan suara di Dewan Rakyat mereka tidak memberikan suaranya. Tetapi di dalam pemungutan suara ini anggota yang tidak setuju mengalami kekalahan suara dan akhirnya diputuskan bahwa anggota Dewan Rakyat menyetujui usul Petisi Soetardjo. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Rakyat maka petisi kemudian diajukan kepada pemerintah Belanda.<sup>61</sup>

Anggota Dewan Rakyat yang tidak setuju ini menganggap bahwa Petisi Soetardjo tidak mempunyai dasar yang nyata, misalnya masa sepuluh tahun diambil dengan sesuka hati tanpa memperimbangkan hal yang lainnya dan disangsikan apakah pemberian otonomi akan mengakhiri rasa tidak senang rakyat terhadap politik pemerintah Belanda.

2. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

Partai Sarekat Islam Indonesia tidak mendukung Petisi Soetardjo karena dianggap seperti permintaan anak kecil yang menuntut perubahan

---

<sup>61</sup> Nina H. Lubis, *op. cit*, hal. 89

politik tanpa mempunyai sandaran dan sendi masyarakat yang kuat. Sehingga Partai Sarekat Islam Indonesia melarang semua anggotanya untuk ikut terlibat dalam Petisi Soetardjo.<sup>62</sup>

### 3. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru)

Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) sangat tidak setuju dengan adanya pengajuan Petisi Soetardjo karena bertentangan dengan cita-cita mereka. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) berpendapat bahwa cita-cita mereka adalah Indonesia Merdeka sepenuhnya dan bukan berdiri sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda, sehingga mereka menolak dan melarang para anggotanya untuk membantu petisi dengan cara apapun.<sup>63</sup>

### 4. Kelompok Sukardjo Wirjopranoto

Anggota Fraksi Nasional yang tidak setuju dengan adanya Petisi Soetardjo bergabung dengan Sukardjo Wirjopranoto. Mereka menolak dengan tegas adanya petisi ini dan dianggap tidak ada gunanya. Bahkan Sukardjo Wirjopranoto sendiri berpendapat bahwa Petisi Soetardjo dapat melemahkan dan mematikan cita-cita rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia atau Indonesia Merdeka.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 232

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 228-229

5. Goesti Moh. Noor

Goesti Moh. Noor adalah seorang keturunan keluarga bangsawan Banjar (Kalimantan Selatan) dan menjadi anggota *Volksraad*. Ia berpendapat bahwa :

“Aku melihat sebagai cita-cita hari depan tidak lebih dan tidak kurang daripada Indonesia yang merdeka. Keberatanku yang paling besar terhadap petisi itu dan yang aku tidak menyetujui ialah bahwa untuk mendapatkan perubahan ketatanegaraan itu diikuti politik meminta-minta yang hina dan tidak ada gunanya.”<sup>65</sup>

Kalimat yang diucapkan oleh Goesti Moh. Noor ini sudah menunjukkan bahwa ia sangat tidak setuju dengan adanya Petisi Soetardjo dan secara tegas menolaknya.

6. Partai-partai Kristen dan *Christelijke Staatkundige Partij* (CPS)

Partai-partai Kristen dan *Christelijke Staatkundige Partij* menolak adanya Petisi Soetardjo, karena mereka berpendapat bahwa Petisi Soetardjo diajukan pada waktu yang tidak tepat. Pengajuan yang tidak tepat ini didasarkan pada pandangan mereka tentang masih banyak masalah-masalah yang lebih besar yang sedang dihadapi dan dipersoalkan tentang apakah kesatuan dalam *Pax Neederlandica* dapat dipertahankan karena perkembangan politiknya belum mantap.<sup>66</sup>

Dukungan terhadap Petisi Soetardjo berasal dari berbagai golongan, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia yang menyetujui adanya Petisi

---

<sup>65</sup> Nina H. Lubis, *op. cit*, hal. 89

<sup>66</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit*, hal. 183.

Soetardjo ini mendesak pemerintah Belanda untuk menerima petisi. Sedangkan di dalam Dewan Rakyat sendiri petisi diterima karena jumlah dukungan terhadap petisi lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tidak menyetujui petisi.

Dalam pembelaan terhadap petisi, Soetardjo mengatakan bahwa keadaan dalam negeri bukan saja masalah primer tetapi juga masalah sekunder. Masalah yang ada menurut Soetardjo adalah mengenai hubungan kerajaan antara negeri Belanda dan Indonesia, di mana Indonesia harus berdiri sendiri agar berkembang kearah yang lebih maju. Tetapi untuk masalah-masalah yang bersifat internasional dan masalah yang menjadi kepentingan bersama akan tetap diurus oleh kerajaan.

Menurut Soetardjo hubungan antara kedua negara yaitu Indonesia dan Belanda perlu ditingkatkan untuk kepentingan kedua belah pihak. Hubungan ini akan berhasil apabila diusahakan perubahan-perubahan dalam bentuk dan susunan pemerintah Hindia Belanda. Perubahan tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Pulau Jawa dijadikan satu provinsi, sedangkan daerah-daerah diluar pulau Jawa dijadikan kelompok-kelompok daerah (*groeps gemeenschappen*) yang bersifat otonom dan berdasarkan demokrasi.
2. Sifat dualisme dalam pemerintahan daerah (*binnenlands bestuur*) dihapus.
3. Gubernur Jenderal diangkat oleh Raja dan mempunyai hak kekebalan (*onschendbaar*).
4. Direktur Departemen mempunyai tanggungjawab.
5. *Volksraad* dijadikan parlemen yang sesungguhnya.

---

<sup>67</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *op. cit*, hal. 226-227

6. *Raad van Indie*, anggota-anggota biasa dan seorang *Vice President* diangkat oleh Raja. Di samping itu ketua dan wakil ketua *Volksraad* sebagai anggota mempunyai suara.
7. Dibentuknya Dewan Kerajaan (*Rijksraad*) sebagai badan tertinggi antara negeri Belanda dan Indonesia, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil kedua daerah dengan satu pimpinan yang diangkat salah seorang dari ketua Parlemen.
8. Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal usul dan cita-citanya adalah untuk Indonesia.

Selain Soetardjo yang mengungkapkan pembelaannya terhadap petisi, I. J Kasimo pun menyatakan bahwa kerjasama ekonomi antara Hindia Belanda dan negeri Belanda tidak akan memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, jika tidak diadakan perubahan di bidang susunan ketatanegaraan seperti yang diusulkan oleh Petisi Soetardjo. Kerjasama antara dua belah pihak yang tidak seimbang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat dan merugikan pihak yang lemah.<sup>68</sup>

Soetardjo dan teman-temannya membuat suatu komite, tujuannya agar petisi mendapat dukungan yang lebih luas dari rakyat dan diterima oleh pemerintah Belanda. Pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuklah suatu Komite Petisi Soetardjo (CPS) yang bertugas untuk memperjuangkan petisi. Pada bulan 1937 Soetardjo kembali mengajukan usul rencana tentang apa yang sebaiknya

---

<sup>68</sup> Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia, *op. cit*, hal. 196

dijalankan pemerintah Belanda terhadap Indonesia supaya menuju Indonesia berdiri sendiri.

Setelah Komite Petisi Soetardjo (CPS) dibentuk, kemudian pada tanggal 4 Oktober 1937 dibentuklah Central Komite Petisi Soetardjo (CCPS) dan untuk lebih memperlancar dukungan terhadap petisi di daerah-daerah dibentuk juga cabang dari Komite Petisi Soetardjo. Anggota Central Komite Petisi Soetardjo (CCPS) antara lain Soetardjo, Hindromartono, Oto Iskandardinata, Atik Soeardi, Agus Salim, I. J. Kasimo, Sinsoe, Datoek Toemenggoeng, Alatas dan Kwo Kwat Tiong. Central Komite Petisi Soetardjo akan mengumpulkan tandatangan dukungan terhadap petisi dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Dalam upaya untuk mendapat sokongan dari berbagai partai dan golongan maka pada tanggal 21 November 1937 Central Komite Petisi Soetardjo mengadakan rapat bersama dan mengundang perwakilan dari berbagai partai atau golongan. Mereka yang diundang diantaranya adalah wakil dari Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Arab Indonesia, Persatuan Minahasa, PSII, dan organisasi-organisasi lainnya serta para pemimpin yang menyokong petisi. Karena PSII menolak Petisi Soetardjo maka tidak mengirimkan wakilnya dalam rapat bersama tersebut.

Di dalam menindaklanjuti rapat bersama pada tanggal 21 November 1937 maka pada tanggal 28 November 1937 kembali diadakan rapat yang berlangsung di daerah Gang Kenari, Jakarta. Di dalam rapat ini diputuskan untuk lebih

menggiatkan dan meneruskan aksi mereka untuk mencari dukungan terhadap petisi.

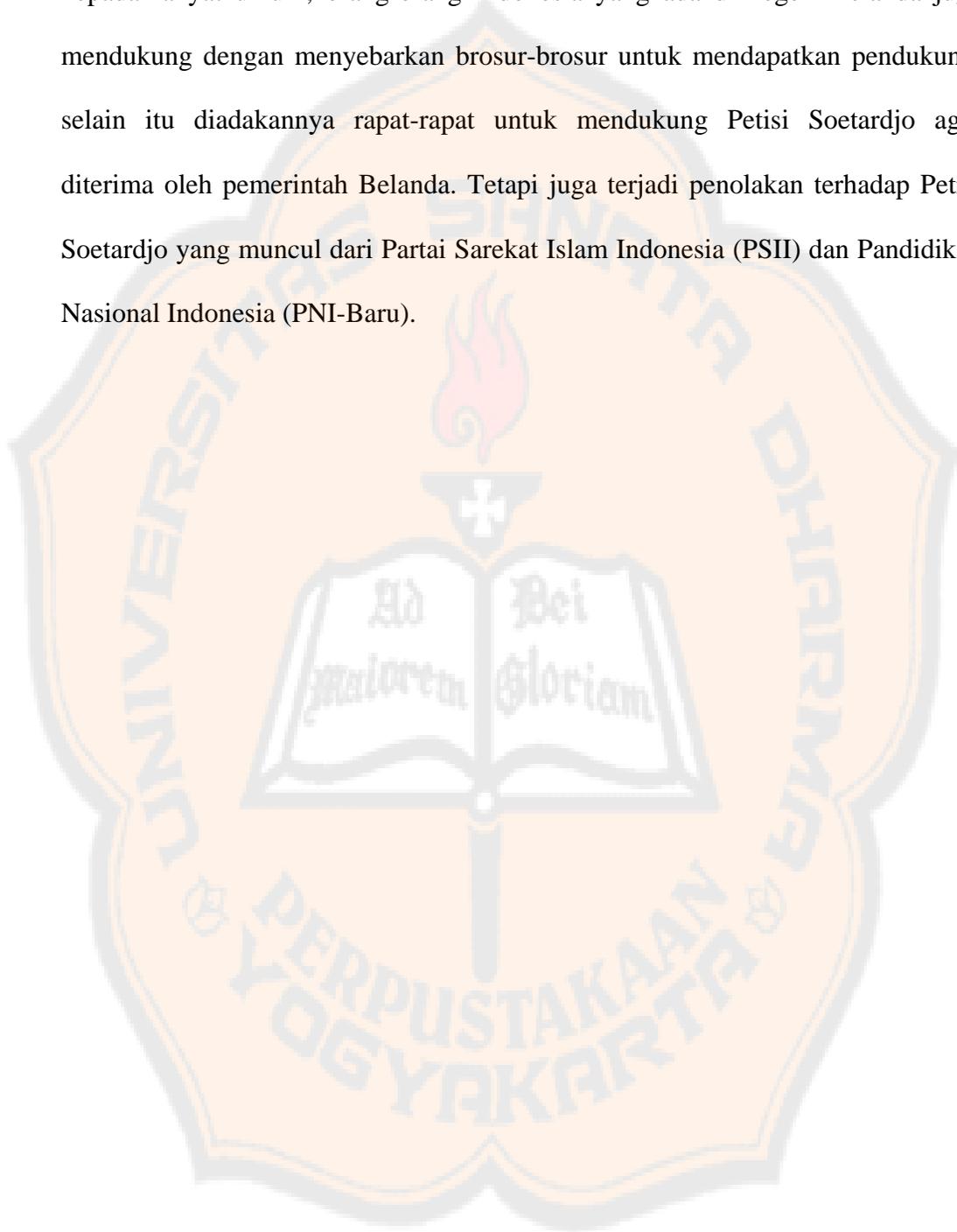
Pada tanggal 19 Desember 1937 Central Comite Petisi Soetardjo mengumumkan kepada semua partai maupun organisasi yang menyokong petisi untuk bekerjasama untuk menyokong petisi dan membentuk sub komite di daerah-daerah. Salah satu organisasi yang melaksanakan pengumuman ini yaitu Perkumpulan Politik Katolik di Indonesia yang telah mendirikan sub-sub komite atas anjuran I. J. Kasimo.

Pendukung-pendukung dari Petisi Soetardjo pada tahun 1938 banyak mengadakan rapat-rapat umum (*openbare meetings*). Di sini orang-orang menyatakan dukungannya terhadap Petisi Soetardjo dan mendesak pemerintah Belanda menerima petisi dan mengabulkannya (lihat lampiran hal 81).

Setelah dikeluarkannya surat penolakan terhadap pengajuan Petisi Soetardjo dari pemerintah Belanda maka pada tanggal 11 Mei 1939 diadakan rapat pengurus Central Comite Petisi Soetardjo (CCPS) di Jakarta. Dalam rapat ini telah diputuskan bahwa CCPS dibubarkan.

Kemunculan Petisi Soetardjo sangat mengagetkan berbagai kalangan rakyat di Indonesia karena Petisi Soetardjo muncul dari golongan Dewan Rakyat (*Volkraad*) yang duduk dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Petisi Soetardjo pada umumnya diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia karena mereka menginginkan adanya perubahan kearah yang lebih baik lagi. Bukti bahwa Petisi Soetardjo diterima oleh rakyat pertama yaitu diterimanya Petisi Soetardjo dalam

sidang *Volksraad* oleh mayoritas anggota yang hadir ketika diadakannya pemungutan suara terhadap Petisi Soetardjo, kemudian adanya dukungan dari pers Indonesia seperti Surat kabar Pemandangan, Tjahja Timoer, Pelita Andalas dan lainnya melakukan dukungan dengan bentuk menyebarkan usul Petisi Soetardjo kepada rakyat umum, orang-orang Indonesia yang ada di negeri Belanda juga mendukung dengan menyebarkan brosur-brosur untuk mendapatkan pendukung, selain itu diadakannya rapat-rapat untuk mendukung Petisi Soetardjo agar diterima oleh pemerintah Belanda. Tetapi juga terjadi penolakan terhadap Petisi Soetardjo yang muncul dari Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Pandidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru).



## BAB IV

### REAKSI PEMERINTAH BELANDA TERHADAP PETISI SOETARDJO

Pergerakan-pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia baik yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif dipandang oleh Belanda sebagai sesuatu yang sangat membahayakan kedudukan pihak kolonial di tanah jajahannya, sehingga Pemerintah Belanda melakukan berbagai cara untuk membungkam pergerakan tersebut bahkan apabila diperlukan pergerakan tersebut akan dibubarkan.

Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an telah membawa dampak yang besar bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan ini membuat pemerintah Belanda semakin memperketat kekuasaannya dengan menindaklanjuti pergerakan nasional yang bersifat non-kooperatif dengan cara yang lebih tegas. Pemerintah juga melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonominya.

Pihak kolonial Belanda tidak pandang bulu dalam menumpas pergerakan nasional. Tokoh-tokoh pergerakan yang bergerak diluar pemerintahan Hindia Belanda banyak yang dipenjara atau diasingkan dengan tujuan agar kaum nasionalis ini tidak menghasut rakyat untuk menentang maupun melawan Pemerintah Belanda. Sedangkan tokoh-tokoh yang bergerak di dalam pemerintahan Hindia Belanda seperti dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*) juga

mengalami hambatan karena aksi-aksi perjuangan mereka ditolak oleh pemerintah Belanda. Salah satunya seperti Petisi Soetardjo.

Petisi Soetardjo yang diajukan kepada pemerintah Belanda melalui Dewan Rakyat (*Volksraad*) pada tanggal 15 Juli 1936 dan didukung oleh sebagian besar anggota Dewan Rakyat. Dengan dukungan dari Dewan Rakyat ini maka usul Petisi Soetardjo diteruskan ke negeri Belanda. Tetapi dapat diduga bahwa Petisi Soetardjo itu tipis kemungkinannya untuk diterima Dewan Perwakilan Belanda.

Petisi Soetardjo memiliki semboyan yaitu “Hindia Berdiri Sendiri”. Tidak semua orang Belanda yang duduk di kursi pemerintahan tidak setuju dengan Petisi Soetardjo tetapi ada juga orang-orang yang setuju dengan diajukannya Petisi Soetardjo ini. Mereka yang setuju adanya Petisi Soetardjo mengirimkan surat kepada Soetardjo sebagai bentuk dukungan mereka terhadap petisi.

Salah satu orang yang mendukung Petisi Soetardjo adalah J. W Mayer Ranneft. J. W Mayer Ranneft merupakan mantan *Vice President Raad Indie*. Ia berpendapat bahwa kerjasama antar golongan di Indonesia akan berkembang dengan baik apabila ada kepastian bahwa Indonesia akan berdiri sendiri karena sudah waktunya diadakan perubahan-perubahan kearah kemajuan bagi Indonesia.<sup>69</sup>

Pada bulan Februari 1938 terjadi pembicaraan mengenai rencana anggaran belanja Hindia Belanda dalam *Tweede Kamer* dan di sini juga Petisi Soetardjo

---

<sup>69</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *op. cit*, hal. 229-230

dibicarakan. Dari semua anggota *Tweede Kamer* yang hadir hampir semua tidak setuju dengan petisi Soetardjo.

Menteri Jajahan pada waktu itu yaitu Walter dan ia juga merupakan wakil dalam sidang tersebut menyatakan bahwa jalan terbaik untuk perubahan pemerintahan Hindia Belanda adalah dengan menjalankan desentralisasi yaitu dengan meletakkan dasar otonom pada tingkat bawah (pemerintah daerah) dan mengharapkan supaya *Tweede Kamer* tidak lagi mempersoalkan Petisi Soetardjo.<sup>70</sup>

Selanjutnya pada persidangan *Volksraad* bulan Juli 1938 Gubernur Jenderal Tjarda juga telah memberikan bayangan yang samar-samar bahwa Petisi Soetardjo akan ditolak oleh pemerintah Belanda. Alasannya yaitu melihat bahwa Petisi Soetardjo yang meminta diadakan konferensi untuk menyusun rencana bagi yang masa yang akan datang tidak dapat disetujui karena isinya kurang jelas. Ia bahkan menyarankan bahwa bagaimanapun juga Petisi Soetardjo harus ditolak sehingga perubahan prinsipil bagi kedudukan Indonesia serta mengadakan konferensi tidak perlu diadakan lagi.

Pada akhirnya Petisi Soetardjo yang diajukan atas nama *Volksraad* ditolak oleh Pemerintah Belanda berdasarkan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 pada tanggal 16 November 1938. Surat keputusan ini disampaikan ketika berlangsungnya sidang *Volksraad* pada tanggal 29 November 1938.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 233

Petisi Soetardjo ditolak dengan berbagai alasan. Tetapi alasan yang utama adalah Pemerintah Belanda menganggap bahwa setiap perubahan yang menyangkut negeri jajahannya dianggap sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat dari golongan mana pun dianggap berbahaya baik dengan cara kasar maupun halus.

Otonomi Indonesia yang diminta dalam Petisi Soetardjo dianggap akan merugikan kepentingan pemerintahan Negeri Belanda karena dengan adanya Petisi Soetardjo tersebut maka pendapatan ekonomi Negeri Belanda dari Indonesia menjadi berkurang sebab sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh Hindia Belanda (Indonesia) digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat pribumi, sedangkan pihak Belanda hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan ekonomi yang dihasilkan oleh Hindia Belanda.

Belanda juga takut akan kehilangan keuntungan yang selama ini diperoleh dari Indonesia. Semboyan mereka adalah *Indie verloren, rampspoed geboren*, yang berarti hilangnya bangsa Indonesia akan mendatangkan bencana bagi negaranya.<sup>71</sup>

Adapun alasan lain yang dikemukakan oleh Belanda untuk menolak Petisi Soetardjo dalam sidang *Volksraad* dalam pembahasan petisi adalah :<sup>72</sup>

1. Berdasarkan tingkat perkembangan politik di Indonesia petisi sangat premature (terlalu pagi). Belanda menganggap bahwa Bangsa Indonesia belum saatnya untuk hidup sendiri dan terlepas sepenuhnya dari Belanda.

---

<sup>71</sup>Setiadi Kartohadikusumo, *op. cit*, hal. 136.

<sup>72</sup>Sartono Kartodirdjo, *op. cit*, hal. 183

2. Dipersoalkan bagaimana kedudukan minoritas di dalam struktur politik baru.
3. Kurangnya kesamaan diantara berbagai rakyat dan bangsa-bangsa menimbulkan pertanyaan siapakah yang akan memegang kekuasaan nanti, hal ini berhubungan erat dengan situasi di Indonesia yang masih dalam taraf pertumbuhannya.
4. Tuntutan ekonomi dipandang sebagai hal yang tidak wajar karena pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik belum memadai. Lagi pula pada saat pengajuan petisi tersebut bertepatan dengan timbulnya kegelisahan politik dan ekonomi dunia dan juga kesulitan yang sedang dihadapi oleh Belanda.

Pemerintah Belanda menganggap bahwa pengajuan Petisi Soetardjo tidak tepat karena berkenaan dengan sedang direncanakannya reformasi struktur politik administratif sebagai pelaksanaan rencana Colijn yaitu terbentuknya negara-negara pulau seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Heterogenitas dipakai sebagai prinsip pembagian itu, namun secara terselubung nampak pula politik *divide et impera*. Selain politik pecah belah ini, ideologi politik kolonial senantiasa menganggap bahwa status otonomi atau kemerdekaan adalah hal yang prematur bagi bangsa Indonesia yang memerlukan perkembangan “alamiah” untuk mencapai kemasakan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 184

Rencana Colijn yang konservatif ini sebenarnya ingin tetap mempertahankan soal-soal kedaerahan. Bagi penguasa kolonial keinginan hidup dalam ikatan kolonial dengan Belanda dianggap suatu kenyataan yang tidak perlu lagi diragukan sehingga pengajuan Petisi Soetardjo yang akan mengubah susunan yang sudah ada dianggap tidak perlu meskipun dalam petisi ini Indonesia masih berada di bawah kerajaan Belanda.

Permohonan dalam Petisi Soetardjo dianggap tidak jelas dan tegas mengenai tujuannya dan tidak sepadan dengan pentingnya pokok-pokok yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya kurang jelas dan tegas tidak menjadi teka teki bagi pemerintah Belanda melainkan menjadi tanda bahwa kemenangan suara dalam *Volksraad* yang menguatkan Petisi Soetardjo cuma sebagai kemenangan lahirnya dan tidak pada hakikatnya, karena mereka yang memberi suara menyetujui tidak mempunyai suatu kehendak yang sama dan tidak satu hati. Oleh karena itu tujuan Petisi Soetardjo tidak dapat ditegaskan dengan jelas.

Dalam mengadakan persidangan permusyawaratan seperti yang dikehendaki oleh Petisi Soetardjo berlawanan dengan hukum negara pada waktu itu. Pada saat itu hukum negara masih dapat “tawar menawar”. Negara atau *staat* bukanlah satu “benda baku” melainkan sifatnya seperti badan yang hidup. Dalam badan yang hidup tidak ada bagian yang “diam” yang tidak berubah-ubah. Setiap

bagiannya senantiasa di dalam gerak dan perubahan dan inilah yang dinamakan sifat dinamis.<sup>74</sup>

Perubahan-perubahan itu berlaku di bagian “dalam”, tidak terlihat keluar, sampai pada waktunya ia akan menyebabkan “bertukar sifat”. Tiap-tiap pertukaran sifat itu boleh jadi sampai menghendaki perubahan “Hukum Negara yang berlaku” dengan mengubah “bangunnya” atau “susunannya” atau mengadakan “pembaharuan”. Inilah perjalanan riwayat negara atau *Historische Ontwikkeling*.<sup>75</sup>

Sebenarnya pendirian pemerintah Belanda terhadap arah *ontvoogding* atau otonomi sampai nanti berakhir pada kemerdekaan wilayah Hindia Belanda dapat dilihat dari dasar-dasar sistem pemerintahan Hindia Belanda yang terletak pada pemerintahan negari induk, sehingga setiap perubahan tergantung dari pada lembaga-lembaga pemerintah Belanda.<sup>76</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda yang sebagai landasan diajukannya Petisi Soetardjo menurut pihak Belanda tidak mengandung suatu keterangan tentang kedudukan Hindia Belanda untuk menguasai diri di dalam perikatan dengan kerajaan Belanda dan ini sangat berlawanan dengan apa yang ditafsirkan oleh pihak penandatanganan Petisi Soetardjo yaitu bahwa Hindia Belanda (Indonesia) kedudukannya sejajar dengan Belanda sehingga diajukan suatu rencana yang isinya pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang

---

<sup>74</sup> Panitia Buku Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, Jakarta, Sinar Harapan, 1984, hal. 159

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hal. 91

berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan pelaksanaannya secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan dalam sidang permusyawaratan.<sup>77</sup>

Waktu sepuluh tahun yang diajukan Petisi Soetardjo dianggap terlalu pendek. Penguasa kolonial menunjukkan kesangsian apakah suara pengusul mencerminkan dan didukung oleh keinginan seluruh rakyat Indonesia. Otonomi hanya dapat direalisasikan secara lambat laun dan dari lembaga bawah ke atas.

Penolakan Petisi Soetardjo oleh pemerintah sangat mengecewakan para pemimpin pergerakan rakyat Indonesia dan para pendukung Petisi Soetardjo. Soetardjo sendiri yang sebagai salah satu penandatangan Petisi Soetardjo mengatakan bahwa penolakan yang dilakukan terhadap Petisi Soetardjo telah memperlihatkan sikap sombong dan ceroboh pemerintah Belanda. Ia juga memperingatkan bahwa sikap yang diambil pemerintah Belanda terhadap petisi adalah keliru.

Pemerintah Belanda yang menolak Petisi Soetardjo tidak menyurutkan langkah rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, tetapi penolakan ini telah mendorong terbentuknya Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang terdiri dari partai politik dan organisasi-organisasi yang berhaluan nasionalis. Anggota-anggotanya antara lain Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Indonesia (PII), Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Pasundan, Persatuan Minahasa, dan PPKI.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 226.

Pemerintah Belanda sangat tidak menginginkan adanya perubahan yang ada di daerah jajahannya karena setiap perubahan dianggap akan membahayakan kepentingan Belanda di tanah jajahannya. Sehingga, ketika Petisi Soetardjo muncul dan diajukan kepada pemerintah Belanda maka secara otomatis Petisi Soetardjo ditolak oleh pemerintah Belanda.



**BAB V**

**KESIMPULAN**

Seperti yang telah dikemukakan di depan, permasalahan dalam skripsi ini ada tiga macam yaitu faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936, reaksi rakyat terhadap Petisi Soetardjo, dan yang terakhir adalah reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo. Kesimpulannya:

1. Faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936
  - a. Faktor Politik yaitu pembuangan terhadap orang-orang radikal yang dianggap menentang dan membahayakan pemerintah Belanda di Indonesia, pertemuan-pertemuan atau rapat yang dilakukan orang-orang Indonesia dibubarkan secara paksa dan bahkan dilarang. Alasan lainnya adalah penuntutan diberlakukannya pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tentang kesamaan kedudukan antara Hindia Belanda dan Belanda. Pada akhirnya terjalin kerjasama yang menguntungkan antar kedua belah pihak.
  - b. Faktor Ekonomi yaitu terjadinya depresi perekonomian dunia yang hebat pada tahun 1930-an dan ini sangat berpengaruh terhadap Hindia Belanda maupun Belanda. Akibat depresi ini maka banyak lembaga-lembaga perekonomian yang ambruk, pabrik serta perusahaan perkebunan bangkrut. Keadaan inilah yang membuat para pekerja diberhentikan dan gaji yang mereka terima dikurangi hingga 90 %.

Sedangkan para pekerja yang bekerja di luar Jawa juga mulai kembali ke daerahnya karena sudah tidak mendapatkan lagi kesempatan bekerja. Ini membuat pendapatan Indonesia di luar Jawa merosot dengan tajam. Keadaan perekonomian yang demikian membuat pemerintah kolonial melakukan pengurangan kesempatan kerja dan menurunkan harga-harga hasil pertanian. Hal ini membuat rakyat semakin menderita. Para pekerja Indonesia mulai kembali ke pertanian tetapi produksi padi yang diperoleh tidak sepenuhnya menyediakan kebutuhan mereka ditambah lagi populasi penduduk yang terus menerus bertambah.

- c. Faktor Sosial yaitu penderitaan rakyat yang semakin parah dan pendidikan pada waktu itu juga hanya menguntungkan pemerintah kolonial saja, karena mereka yang memperoleh pendidikan dipekerjakan untuk pemerintah dan bukan untuk membantu perkembangan rakyat Indonesia untuk lebih baik lagi. Kondisi seperti ini mempertajam garis pemisah antara bangsa Belanda dan Indonesia, serta kekayaan yang diperoleh bangsa Belanda membuat sikapnya semakin tertutup dan jauh dari rakyat.

### 2. Reaksi rakyat terhadap Petisi Soetardjo

Masyarakat yang mendukung Petisi Soetardjo menganggap bahwa pengajuan Petisi sudah tepat karena Indonesia sudah matang dan sepantasnyalah pemerintah Belanda memberikan hak-hak lebih banyak kepada Indonesia. Konferensi antara Indonesia dan Belanda perlu dilakukan

mengingat hubungan keduanya ini. Selain itu perubahan susunan ketatanegaraan yang diajukan dalam Petisi Soetardjo juga mendapatkan dukungan. Dukungan rakyat Indonesia terhadap Petisi Soetardjo berasal dari pers Indonesia, Pergerakan Penyardar, Partai Arab Nasional (PAI), Perhimpunan Indonesia, Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi), Paguejoeban Pasoendan.

Sedangkan Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Partai Indonesia Raya (Parindra) sikapnya terhadap Petisi Soetardjo setengah-setengah, mereka hanya mendukung tentang diadakannya konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Untuk isi dari Petisi Soetardjo ini sendiri mereka menolaknya. Di lain pihak juga terjadi penolakan terhadap Petisi Soetardjo mereka ini berasal dari beberapa golongan di antaranya Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), Partai-partai Kristen dan *Christelijke Staatkundige Partij* (CPS). PSII dan PNI-Baru menganggap bahwa Petisi Soetardjo sangat bertentangan dengan cita-cita mereka yaitu Indonesia merdeka sepenuhnya.

### 3. Reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo

Petisi Soetardjo ditolak dengan dikeluarkannya keputusan Kerajaan Belanda No. 40 pada tanggal 16 November 1938 dan keputusan ini disampaikan pada sidang *Volksraad* tanggal 29 November 1938. Dalam keputusan tersebut tidak dicantumkan secara jelas alasan penolakan pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo. Tetapi dapat dilihat bahwa

penolakan pemerintah Belanda terhadap pengajuan Petisi Soetardjo lebih dikarenakan pemerintah Belanda menganggap bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang perubahan yang ada di dalam negeri jajahannya merupakan suatu ancaman bagi kedudukan pemerintah Belanda di negara jajahannya tersebut dan ini berlaku bagi semua yang dianggap akan membahayakan kedudukan pemerintah, termasuk anggota Dewan Rakyat yang duduk dekat dengan mereka

Pemerintah juga menganggap bahwa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri karena pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia belum memadai. Dengan adanya perekonomian yang matang maka kesejahteraan rakyat akan terjamin.

Dengan ditolaknya Petisi Soetardjo oleh pemerintah Belanda maka orang-orang Indonesia tidak dapat lagi mengharapkan sesuatu yang dapat menguntungkan Indonesia dari pemerintah Belanda. Pengharapan ini terutama adalah kemerdekaan bagi Indonesia atau paling tidak pemberian otonomi bagi Indonesia seperti yang diminta dalam Petisi Soetardjo.

Petisi Soetardjo menunjukkan nilai tentang demokrasi baik bagi pembelajaran sejarah maupun bangsa Indonesia sekarang ini. Dalam pembelajaran sejarah, dikenalkan pada siswa nilai-nilai demokratis. Hal ini dapat mereka kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi bangsa Indonesia yang masih dalam taraf perkembangan nilai-nilai demokrasi perlu dikembangkan dan

dipraktekkan dalam segala bidang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam masyarakat yang heterogen ini. Sehingga rakyat Indonesia merasa memiliki Indonesia ini dan tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim,  
1936 : *Hindia Berdiri Sendiri Oesoel Petisi Soetardjo dan Pemitjaraan dalam Volksraad*. Terjemahan dari bahasa Belanda, s-Gravenhage, Batavia.
- Algadri, Abu Hanifah  
1984 : *C. Snouck Hurgranje. Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Aritonang, Jan S,  
2004 : *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam,  
2005 : *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Iin Nur Insaniwati,  
2002 : *Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya (1924-1968)*, Indonesiatara, Magelang.
- Kuntowijoyo,  
1995 : *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta
- Lubis, Nina H,  
2003 : *Si Jalak Harupat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moedjanto, G,  
1988 : *Indonesia Abad ke-20 I : Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, Kanisius, Yogyakarta.
- Natsir, Moh,  
2007 : *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Onghokham,  
1987 : *Runtuhnya Hindia Belanda*, PT Gramedia, Jakarta.

- Panitia Buku Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim,  
1984 : *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Pluvier, J. M.,  
Tanpa Tahun, *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia*.
- Pringgodigdo,  
1994 : *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Prodi Pendidikan Sejarah,  
*Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Sejarah*, 2007, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Raho, Bernard SVD,  
2007 : *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ricklefs, M. C.,  
2005 : *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Rukmana Amanwinata,  
1985 : *Kamus Istilah Tatanegara*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo,  
1990 : *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2*, PT Gramedia, Jakarta.
- 
- 1992 : *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto,  
1982 : *Sejarah Nasional Indonesia V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Setiadi Kartohadikusumo,

1990 : *Soetardjo "Petisi Soetardjo" dan Perjuangannya*, Sinar Harapan, Jakarta.

Simbolon, Parakitri T,

1995 : *Menjadi Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.

Slamet Muljana,

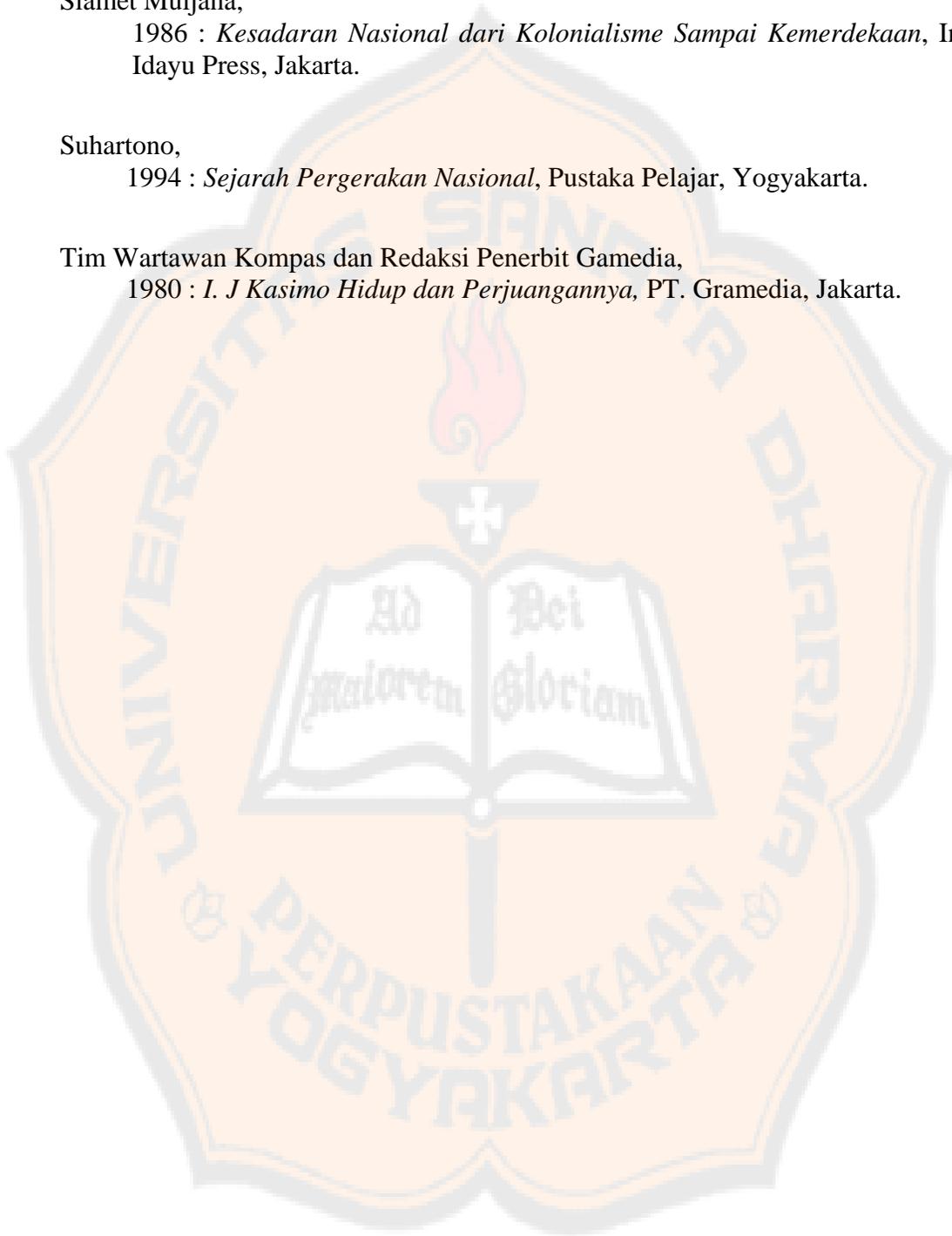
1986 : *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, Inti Idayu Press, Jakarta.

Suhartono,

1994 : *Sejarah Pergerakan Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Tim Wartawan Kompas dan Redaksi Penerbit Gramedia,

1980 : *I. J Kasimo Hidup dan Perjuangannya*, PT. Gramedia, Jakarta.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPPIRAN

Lampiran I

**SILABUS**  
**KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**

Nama Sekolah : SMA Pandan Arum Bumiayu  
 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial  
 Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas / Semester : XI / 2  
 Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2.1 Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat di	1. Faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936 2. Reaksi rakyat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendiskusikan faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936 melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas</li> <li>▪ Mendiskusikan Reaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendeskripsikan faktor politik, ekonomi dan social yang mendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936</li> <li>▪ Mendeskripsikan</li> </ul>	1. Penilaian proses a. Bentuk: observasi b. alat: essay  2. penilaian produk bentuk: tes	1 X 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1982, <i>Sejarah Nasional Indonesia</i>, Jakarta: Departemen Pendidikan dan</li> </ul>

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Indonesia pada masa kolonial	Indonesia terhadap Petisi Soetardjo  3. Reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo	rakyat Indonesia terhadap Petisi Soetardjo melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas  ▪ Mendiskusikan sebab-sebab Petisi Soetardjo ditolak oleh pemerintah Belanda melalui diskusi kelompok dan diskusi kelas	reaksi rakyat Indonesia baik yang mendukung maupun yang menolak Petisi Soetardjo  ▪ Mendeskripsikan Petisi Soetardjo ditolak oleh pemerintah Belanda			Kebudayaan, • Setiadi Kartohadikusumo, 1990, <i>Soetardjo</i> , Jakarta: Sinar Harapan.
------------------------------	---	--	--	--	--	---

Yogyakarta, 19 Januari 2009

Mengetahui  
Kepala Sekolah

Drs. Matius

Guru Mata Pelajaran

Maria Purwaningsih

**Lampiran II**

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN**

1. Nama Sekolah : SMA Pandan Arum Bumiayu
2. Program : IPS
3. Mata Pelajaran : Sejarah
4. Kelas / Semester : XI / II
5. Standar Kompetensi : 2. Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang
6. Kompetensi Dasar : 2.1 Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia pada masa kolonial.
7. Indikator :
  1. Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong munculnya Petisi Soetardjo tahun 1936
  2. Mendeskripsikan reaksi rakyat Indonesia terhadap Petisi Soetardjo
  3. Mendeskripsikan reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo
8. Alokasi Waktu : 1 X 45 menit

**A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

1. Siswa dapat menjelaskan tentang faktor politik pendorong munculnya Petisi Soetardjo
2. Siswa dapat menjelaskan tentang faktor ekonomi pendorong munculnya Petisi Soetardjo
3. Siswa dapat menjelaskan tentang faktor sosial pendorong munculnya Petisi Soetardjo

4. Siswa dapat menjelaskan reaksi rakyat Indonesia terhadap kemunculan Petisi Soetardjo
5. Siswa dapat menjelaskan tentang reaksi pemerintah Belanda terhadap Petisi Soetardjo.

## **B. MATERI PEMBELAJARAN**

- Petisi Soetardjo tahun 1936

## **C. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN**

1. Metode Pembelajaran
  - Diskusi
2. Media Pembelajaran
  - Gambar/foto para penandatangan Petisi Soetardjo

## **D. STRATEGI PEMBELAJARAN**

1. Pendahuluan

Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai

  - ✓ Motivasi : memperlihatkan gambar/foto
  - ✓ Apersepsi : apakah yang dimaksud dengan petisi ?
2. Kegiatan Inti
  - a. Mengarahkan siswa untuk membaca buku sejarah memuat Petisi Soetardjo
  - b. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari empat siswa setiap kelompoknya
  - c. Guru membagikan soal diskusi dan siswa berdiskusi dalam kelompoknya
  - d. Setelah selesai berdiskusi masing-masing perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan kelompok lain menanggapi



Keterangan :

1. Kedisiplinan
2. Partisipasi
3. Kejujuran
4. Sopan Santun
5. Minat

Skor :

5 = Amat Baik

4 = Baik

3 = cukup

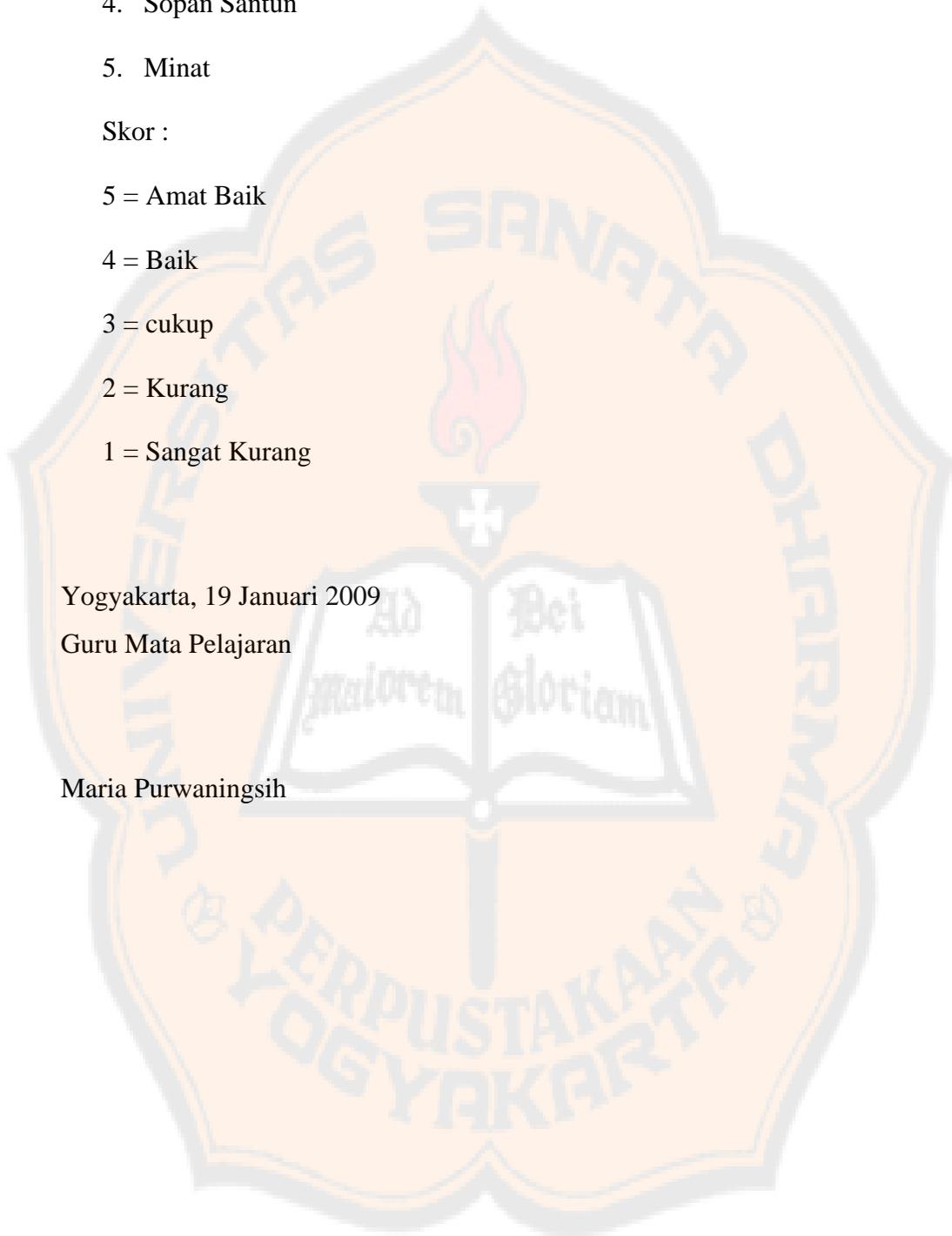
2 = Kurang

1 = Sangat Kurang

Yogyakarta, 19 Januari 2009

Guru Mata Pelajaran

Maria Purwaningsih

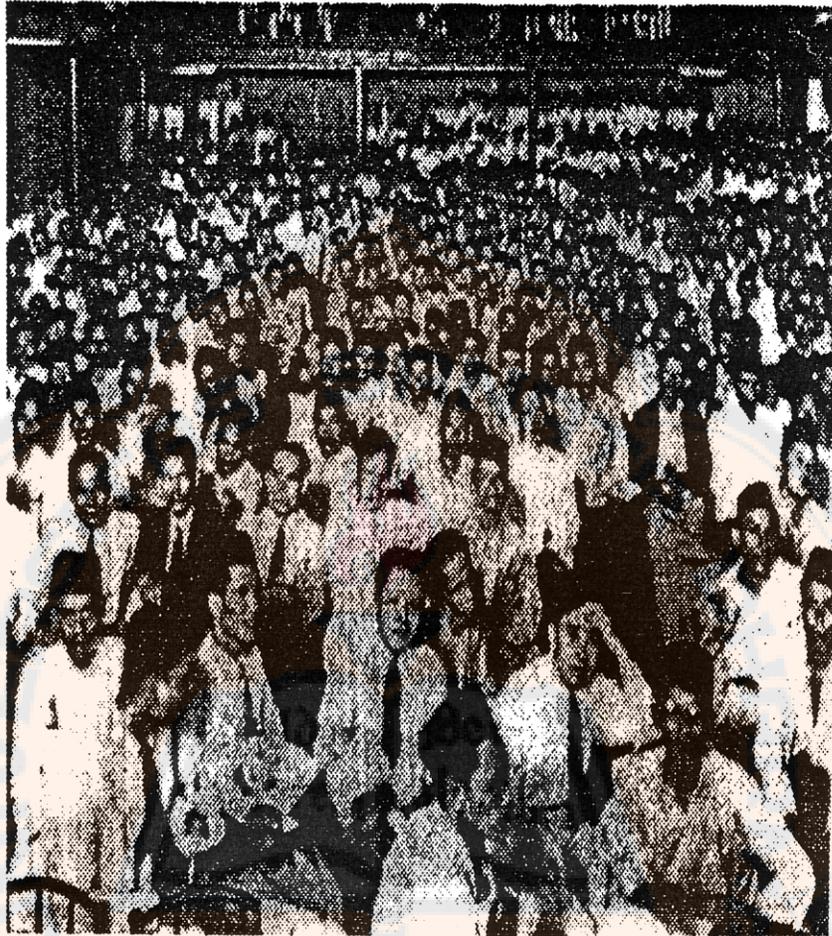


## Lampiran III



Suatu sidang Dewan Rakyat (*Volksraad*) yang sedang memperdebatkan “Petisi Soetardjo”  
(Setiadi kartohadikusumo, Soetardjo “Petisi Soetardjo” dan perjuangannya.  
Jakarta, Sinar Harapan, 1990, hal. 122)

Lampiran IV



Rapat-rapat umum yang dilakukan oleh para pendukung  
Petisi Soetardjo pada Tahun 1938  
(Setiadi kartohadikusumo, Soetardjo "Petisi Soetardjo" dan perjuangannya.  
Jakarta, Sinar Harapan, 1990, hal. 123)